



RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014





BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 21 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergisitas antara program-program pemerintah dengan pemerintah daerah, maka perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat visi, misi, dan prioritas pembangunan tahun 2014, serta rancangan kerangka ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kaedah pelaksanaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk menentukan kegiatan dan indikasi besarnya anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2016.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 merupakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014.

BAB III PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Program/Kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2014 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Program/Kegiatan SKPD yang mendesak dapat dibiayai melalui perubahan Anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- BAB VI Penutup

(2) Isi beserta uraian sistematika RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PENTUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal, 21 Mei 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



ZUMI ZOLA ZILKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal, 21 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**



H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 21

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.

Memasuki Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan kepada permasalahan pembangunan yang semakin menantang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik ditingkat lokal maupun global. Mengamati hasil pembangunan tahun sebelumnya disadari bahwa Pemerintah Daerah harus menggerakkan seluruh potensi sumber daya guna dapat mengatasi masalah dan mencapai sasaran pembangunan yang lebih tinggi. Sasaran pembangunan demikian dibutuhkan guna mencapai percepatan pembangunan yang lebih tinggi di Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan selalu mengarah kepada perbaikan, maka proses penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan. Oleh karena itu dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka format dan struktur penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan karena bentuknya semakin lebih baik. Dalam kaitan ini tentunya harus disadari bahwa seluruh program dan kegiatan Tahun 2014 ini masing-masingnya terkait dengan SKPD yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga seluruh SKPD harus memberikan perhatiannya agar seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata mari kita laksanakan seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2014 dengan optimis dan lebih baik sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dari Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak,

2013

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I - 7
1.4 Sistematika RKPD.....	I - 10
1.5 Maksud dan Tujuan.....	I - 11
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	II - 1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II - 1
2.1.1.....	G
gambaran Geografi dan Demografi.....	II - 1
2.1.2.....	A
spek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 5
2.1.3.....	A
spek Pelayanan Umum	II - 13
2.1.4.....	A
spek Daya Saing Daerah	II - 23
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan.....	II - 30
2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah	II - 74
2.3.1.....	I
su Strategis.....	II - 74

2.3.2.....	P		
	Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....		II - 80
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH			III - 1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....		III - 1
3.1.1.....	K		
	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013.....		III - 1
3.1.2.....	T		
	Perkiraan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013.....		III - 7
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah		III - 14
3.2.1.....	P		
	Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan		III - 14
3.2.2.....	A		
	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....		III - 16
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....			IV - 1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....		IV - 2
4.2	Prioritas dan Pembangunan Tahun 2014.....		IV - 12
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....			V - 1
BAB VI PENUTUP.....			VI - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II - 3
Tabel 2.2	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 dan 2012.....	II - 4
Tabel 2.3	PDRB (dalam jutaan), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Tanjung Jabung Timur (%) Tahun 2011-2012 (Harga Konstan).....	II - 6
Tabel 2.4	Struktur Ekonomi Kab.Tanjung Jabung Timur (%) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2012.....	II - 7
Tabel 2.5	PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2012 (Rupiah).....	II - 8
Tabel 2.6	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s.d 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II - 10
Tabel 2.7	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama SekolahKabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2007-2011.....	II - 11
Tabel 2.8	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II - 13
Tabel 2.9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010 s.d 2012 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II - 14
Tabel 2.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II - 15

Tabel 2.11	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010 s.d 2012.....	II - 16
Tabel 2.12	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II - 17
Tabel 2.13	Perkembangan Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 s/d 2012.....	II - 18
Tabel 2.14	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II - 19
Tabel 2.15	Perkembangan Sektor Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2012.....	II - 20
Tabel 2.16	Perkembangan Pelayanan Pada RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2010 s/d Tahun 2012.....	II - 21
Tabel 2.17	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2007 s.d 2012 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II - 22
Tabel 2.18	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2007 s.d 2012 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II - 22
Tabel 2.19	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010 s/d 2012 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II - 23
Tabel 2.20	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan, Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011.....	II - 24
Tabel 2.21	Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi Jambi Per Subsektor Desember 2012.....	II - 26
Tabel 2.22	Rencana Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031.....	II - 29
Tabel 2.23	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II - 32
Tabel 2.24	Sandingan Isu Strategis antara RKP Tahun 2014 dengan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014.....	II - 75
Tabel 3.1	PDRB (dalam jutaan) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Timur (%) Tahun 2011 – 2012 (Harga Konstan).....	III - 5
Tabel 3.2	Struktur Ekonomi Tanjung Jabung Timur (%) Atas Harga Berlaku Tahun 2011-2012.....	III - 6
Tabel 3.3	PDRB PerKapita Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2012 (Rupiah)....	III - 7

Tabel 3.4	Realisasi PMA dan PMDN Sektor NonMigas Triwulan III tahun 2011.....	III - 9
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 s.d Tahun 2014.....	III - 15
Tabel 4.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan.....	IV - 5
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV - 13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rancangan APBD.....	I - 4
------------	---------------------------------------	-------

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah merupakan kesatuan dalam perencanaan pembangunan Nasional. Sesuai dengan amanat tersebut maka perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi. Dasar dari amanat tersebut mengacu pada pertimbangan bahwa apa yang ingin dicapai dalam pembangunan semua level pemerintahan adalah sama yaitu kesejahteraan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah berawal dari kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, dinamika perkembangan dan pengintegrasian dalam rencana tata ruang. Secara hierarki, rencana pembangunan daerah terdiri dari: perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). Dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD, merupakan dokumen yang memuat perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya akan dilaksanakan melalui pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Pemerintah Pusat, dan swasta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja-SKPD untuk tahun yang sama.

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2014 ini merujuk pula pada dokumen-dokumen Perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2014, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2014 terutama keterkaitannya dengan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2014.

RKPD Tahun 2014 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2014.

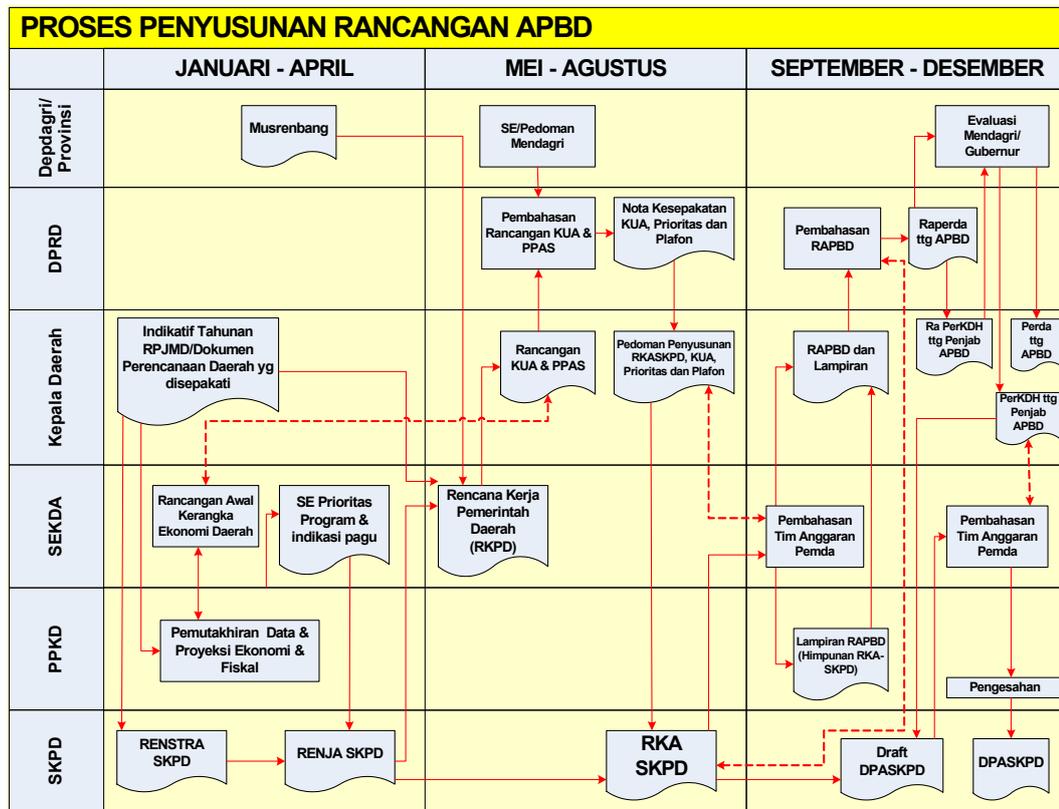
Penyusunan RKPD tahun 2014 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan parapakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai Nasional.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergiskannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi.

Hasil dari RKPD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut alur proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) hingga penyusunan rancangan APBD.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rancangan APBD



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan RKPD sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011–2016.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kabupaten yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, mengacu pada RPJM Provinsi Jambi Tahun 2010–2015, serta RPJM Nasional Tahun 2010–2014.

Ada 4 indikator pengukuran keberhasilan pembangunan, yang pertama, adanya konsistensi yang tinggi antara dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai lokal. Kedua, keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Ketiga, adanya rasionalitas terhadap target-target yang menjadi sasaran pembangunan yang ditinjau dari aspek kemampuan daerah. Dan keempat, komitmen kepemimpinan terhadap kebijakan pembangunan yang ditetapkan.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur), yaitu sebagai berikut:

1) RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pada tanggal 15 Januari 2010. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, yaitu: (i) Buku I dengan judul: "Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan", (ii) Buku II dengan judul: "Memperkuat Sinergi Antar bidang Pembangunan", dan (iii) Buku III dengan judul: "Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antar Daerah".

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini memuat program-program yang dinaungi ke dalam Program Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk Semua (*justice for all*); dan Program Pencapaian Tujuan Milenium (*Millenium Development Goals - MDGs*).

2) RPJM Daerah Provinsi Jambi

RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

3) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

RPJM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016; memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik, untuk periode perencanaan 5 tahunan.

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016. Tema dasarnya adalah "*Meningkatkan Perencanaan Dan Belanja Yang Berkualitas Yang Pro Rakyat Menuju Tanjung Jabung Timur Samudra (Sejahtera, Adil, Mandiri, Unggul, Demokratis dan Agamis*".

4) RENJA – SKPD

Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja-SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja-SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2014 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPDP Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja-SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Mengacu pada rancangan awal RKPDP Tahun 2014, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja-SKPD Tahun 2014, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPDP Tahun 2014.
- b. Mengacu pada Renstra-SKPD Tahun 2011- 2016, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPDP yang disusun ke dalam rancangan Renja-SKPD, selaras dengan Renstra-SKPD.
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra-SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja-SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja-SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- e. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPDP.

1.4 Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2012 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2015.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk :

- a. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2014.

1.5.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB 2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; aspek daya saing daerah yang uraiannya dijelaskan secara rinci dan substansi dibawah ini :

2.1.1 Gambaran Geografi dan Demografi

1. Gambaran Geografi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.445,0 Km² atau 10,2% dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km² yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km² dan lautan/perairan seluas 3.560 Km².

Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara atau antara 103°23'-104°31' Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan, sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa. Kesebelas kecamatan tersebut meliputi :

- 1) Kecamatan Mendahara, terdiri atas 8 desa dan 1 kelurahan;
- 2) Kecamatan Mendahara Ulu, terdiri atas 6 desa dan 1 kelurahan;
- 3) Kecamatan Geragai, terdiri atas 8 desa dan 1 kelurahan;
- 4) Kecamatan Dendang, terdiri atas 6 desa dan 1 kelurahan;
- 5) Kecamatan Muara Sabak Timur, terdiri atas 10 desa dan 2 kelurahan;
- 6) Kecamatan Muara Sabak Barat, terdiri atas 7 kelurahan;
- 7) Kecamatan Kuala Jambi, terdiri dari atas 4 desa dan 2 kelurahan;
- 8) Kecamatan Rantau Rasau, terdiri atas 10 desa dan 1 kelurahan;
- 9) Kecamatan Berbak, terdiri atas 5 desa dan 1 kelurahan;
- 10) Kecamatan Nipah Panjang, terdiri atas 8 desa dan 2 kelurahan; dan
- 11) Kecamatan Sadu, terdiri atas 8 desa dan 1 kelurahan.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/ kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan.

Perlu kita pahami bahwa sebaran desa dan kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan dengan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada

masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

Wilayah Administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada awal terbentuknya Kabupaten ini terdiri dari 6 Kecamatan dan 63 Desa/Kelurahan, namun sejak tahun 2006 dimekarkan menjadi 11 Kecamatan, 20 Kelurahan, dan 73 Desa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Kecamatan	
		Kelurahan	Desa	Km ²	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478,17	8,78
5.	Muara Sabak Timur	2	10	410,28	7,53
6.	Muara Sabak Barat	7	0	251,75	4,62
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
JUMLAH		20	73	5.445,00	100,00

Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2012

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang sangat bervariasi mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa/gambut dengan ketinggian antara 0 - 10 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah/gambut ini biasanya ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 4 bulan basah, 8 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan

curah bulan kering 71-103 mm. Suhu udara rata-rata 22,90°C – 31,40°C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

2. Gambaran Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 meningkat sebanyak 1.102 jiwa dari 210.420 jiwa pada tahun 2011 menjadi 211.522 jiwa pada tahun 2012 atau dengan pertumbuhan 0,52 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2012 sebanyak 38,85 jiwa/km² dan sex ratio 105.

Dari data pada tabel 2.2 dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kuala Jambi, hal ini dikarenakan jumlah penduduknya yang relatif besar terhadap luas wilayah kecamatan dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Sadu karena jumlah penduduk yang relatif kecil.

Tabel 2.2.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci per Kecamatan Tahun 2011 dan 2012

No.	Kecamatan	2011					2012				
		Σ Penduduk Laki-laki	Σ Penduduk Perempuan	Σ Penduduk (TOTAL)	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km ²)	Σ Penduduk Laki-laki	Σ Penduduk Perempuan	Σ Penduduk (TOTAL)	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Mendahara	13.402	12.821	26.223	105	28,78	13.334	12.785	26.119	104	28,67
2	Mendahara Ulu	7.892	6.911	14.803	114	38.82	7.920	7.099	15.019	112	39,39
3	Geragai	11.465	9.980	21.445	115	75.15	11.469	10.221	21.690	112	76,01
4	Dendang	7.786	7.483	15.269	104	31.93	7.778	7.491	15.269	104	31,93
5	Ma. Sabak Barat	8.053	7.562	15.615	106	62.03	8.167	7.843	16.010	104	63,59
6	Ma. Sabak Timur	15.953	15.727	31.680	101	77.22	15.939	15.749	31.688	101	77,24
7	Kuala Jambi	7.287	7.067	14.354	103	119.10	7.283	7.079	14.362	103	119,17
8	Rantau Rasau	11.602	11.029	22.631	105	63.55	11.734	11.180	22.914	105	64,34
9	Berbak	5.152	4.898	10.050	105	51.68	5.146	4.903	10.049	105	51,68
10	Nipah Panjang	13.143	12.818	25.961	103	110.61	13.145	12.847	25.992	102	110,75
11	Sadu	6.382	6.007	12.389	106	6.80	6.386	6.024	12.410	106	6,81
JUMLAH		108.117	102.303	210.420	106	38,64	108.301	102.221	211.522	105	38,85

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa fokus yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.

Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap digunakan dan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. PDRB merupakan totalitas nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan setelah dikurangi biaya produksinya dari berbagai unit usaha di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan Katalog BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 1403.1506, unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) sektor : (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, gas, dan air bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, hotel, dan restoran, (7) Pengangkutan dan komunikasi, (8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta (9) Jasa-jasa. Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (*current price*) maupun berdasarkan harga konstan (*constant price*).

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan. Mengingat PDRB atas dasar harga berlaku mengandung unsur inflasi makro, maka tinggi rendahnya pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan

demikian, PDRB atas dasar harga berlaku belum dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil Tanjung Jabung Timur. Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil, dapat digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan tahun 2012 meningkat dari tahun 2011 yaitu dari IDR 2.566.987,49 menjadi IDR 2.757.284,71. Peningkatan ini merupakan indikasi dari membaiknya perekonomian kabupaten ini, hal yang lebih mengembirakan adalah bahwa laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari tahun 2011 terjadi pada sektor sekunder dan sektor tersier. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2. 3 berikut :

Tabel 2.3

PDRB (dalam jutaan), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Tanjung Jabung Timur (%) Tahun 2011-2012 (Harga Konstan)

No.	Sektor	2011		2012*	
		PDRB	Laju	PDRB	Laju
			Pertumbuhan		Pertumbuhan
1.	Pertanian	711,824.31	5.18	742,721.30	4.34
2.	Pertambangan dan penggalian	968,665.79	8.6	1,076,565.73	11.14
3.	Industri pengolahan	245,292.02	3.66	253,229.34	3.24
4.	Listrik, gas, dan air bersih	3,197.34	9.08	3,472,22	8.60
5.	Bangunan	34,672.97	6.35	36,933.39	6.52
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	383,849.34	8.82	417,230.31	8.70
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	97,016.33	5.01	100,609.22	3.70
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	33,669.52	7.5	35,245.20	4.68
9.	Jasa-jasa	88,799.87	3.68	91,277.90	2.79
TOTAL		2,566,987.49	6.83	2,757,284.71	7.41

*Angka Sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah.

Struktur Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 terutama didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh sektor perdagangan-hotel dan restoran, industri pengolahan, pengangkutan-komunikasi, jasa-jasa, konstruksi- bangunan,

keuangan–persewaan–jasa perusahaan, serta listrik–gas dan air bersih. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4
Struktur Ekonomi Kab. Tanjung Jabung Timur (%) Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2011-2012

No.	Sektor	2011	2012*
1.	Pertanian	27.73	26.94
2.	Pertambangan dan penggalian	37.74	39.04
3.	Industri pengolahan	9.56	9.18
4.	Listrik, gas, dan air bersih	0.12	0.13
5.	Bangunan	1.35	1.34
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	14.95	15.13
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3.78	3.63
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	1.31	1.28
9.	Jasa-jasa	3.46	3.31

* Angka Sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, Data Diolah

Tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Perkembangan tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata per penduduk.

Bila diamati pola perubahannya, peningkatan pendapatan perkapita nominal ternyata lebih berfluktuasi mengikuti perubahan tingkat harga umum atau inflasi, tetapi laju kenaikan pendapatan per kapita riil meningkat secara konsisten. Peningkatan pendapatan perkapita riil menunjukkan dua hal yaitu: (1) peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang melebihi kenaikan tingkat harga umum dan (2) peningkatan pendapatan riil yang melebihi kenaikan jumlah penduduk. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang berswasembada pangan sehingga potensi gejolak kenaikan tingkat harga umum yang bersumber dari volatilitas harga komoditas pangan relatif kecil. Fakta

menunjukkan tingkat harga komoditas bahan makanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat harganya di daerah lain khususnya dalam kawasan Provinsi Jambi.

Tabel 2.5

PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011-2012 (Juta Rupiah)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	
TAHUN	PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN
2011	12.199.351
2012*	13.035.451
PERTUMBUHAN	6,85

* angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah

Peningkatan pendapatan perkapita rill menunjukkan bahwa telah terjadi upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2012, nilai pendapatan perkapita adalah sebesar Rp.12.870.764,00 per Tahun atau Rp. 1.086.287,00 per Bulan. Menurut Badan Pusat Statistik angka ini jauh diatas garis batas kemiskinan tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 259.250,00 perkapita per bulan. Jika hingga saat ini masih ditemui angka kemiskinan yang besar berarti lebih mencerminkan adanya ketimpangan pendapatan antar sektor ekonomi.

b. Laju Inflasi

Laju Inflasi tidak dihitung oleh seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan data laju inflasi Provinsi Jambi dalam memenuhi kebutuhan data-data termasuk kebutuhan data dalam dokumen perencanaan.

Berdasarkan catatan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jambi Nomor 01/01/15/Th.VII, pada akhir bulan Desember 2012 Provinsi Jambi mengalami inflasi sebesar 0,62%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 139,12.

Inflasi terjadi pada empat kelompok barang dan jasa karena adanya kenaikan indeks Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,14%; Kelompok Sandang sebesar 0,06%; Kelompok Kesehatan sebesar 0,11%; dan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,23%. *Deflasi* terjadi pada Kelompok Makanan Jadi, Rokok dan tembakau sebesar 0,01%, Kelompok Perumahan sebesar 0,22%, dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,05%.

Laju inflasi Provinsi Jambi sampai dengan akhir Desember 2012 tercatat sebesar 4,22%, hal ini masih di bawah angka proyeksi nasional sebesar 4,5%, ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi tergolong pada angka inflasi yang cukup rendah dan cenderung stabil.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat menulis dan membaca. Semakin tinggi persentase melek huruf, semakin tinggi pula mutu Sumber Daya Manusia suatu masyarakat.

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Tahun 2011-2016, angka melek huruf ditargetkan sebesar 93,40 % dan diprediksi dapat terealisasi sebesar 96,02 % atau 102,81 %. Hal ini berarti masih ada 3,98 % penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berumur lebih dari 15 tahun yang belum dapat membaca atau buta huruf. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6. dibawah ini :

Tabel 2. 6

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s.d 2012
Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis (orang)	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (orang)	Angka melek huruf (%)	Angka buta huruf
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	10,472	10,702	97.85	230
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	22,472	22,891	98.17	419
3	Kecamatan Mendahara	17,178	18,805	91.35	1,627
4	Kecamatan Mendahara Ulu	9,415	10,173	92.55	758
5	Kecamatan Geragai	14,749	15,231	96.84	482
6	Kecamatan Dendang	10,477	10,800	97.01	323
7	Kecamatan Kuala Jambi	9,772	10,122	96.54	350
8	Kecamatan Sadu	8,591	9,001	95.44	410
9	Kecamatan Nipah Panjang	17,521	18,504	94.69	983
10	Kecamatan Berbak	6,822	7,036	96.96	214
11	Kecamatan Rantau Rasau	16,355	16,522	98.99	167
JUMLAH		143,824	149,787	96.02	5,963
2011		139,541	146,134	95.49	6,593
2010		137,816	145,129	94.96	7,313

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Meskipun angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun ke tahun selalu diatas 90% (kemampuan baca tulis penduduk sudah baik), namun bila dibandingkan dengan angka melek huruf di Kabupaten/Kota lain, angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berada dibawah. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam upaya menekan angka buta huruf.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Kondisi ideal rata-rata lama sekolah yang digariskan oleh UNDP adalah 15 tahun, apabila diuraikan 15 tahun tersebut antara lain 6 tahun pertama untuk

pendidikan jenjang sekolah dasar, setelah lulus 3 tahun berikutnya menempati jenjang sekolah lanjutan pertama hingga tamat SLTP kemudian jenjang sekolah SLTA selama 3 tahun dan setelah tamat diharapkan mampu meneruskan sekolah lagi selama 3 tahun sampai lulus setara dengan pendidikan Diploma III.

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011 yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Tahun 2011-2016, angka rata-rata lama sekolah ditargetkan sebanyak 6,82 tahun dan dapat terealisasi sebanyak 6,30 tahun atau sebesar 92,38 %.

Sama dengan angka melek huruf, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai trend positif dari tahun ke tahun namun masih pada posisi terendah di provinsi Jambi. Hal ini juga menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7. dibawah ini.

Tabel 2.7.
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2007-2011

Kabupaten/ Kotamadya	Rata-Rata Lama Sekolah				
	2007	2008	2009	2010	2011
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Kerinci	8,1	8,1	8,11	8.11	8.200
Merangin	7,45	7,45	7,47	7.5	7.550
Sarolangun	6,9	6,9	7,04	7.14	7.320
Batanghari	7,51	7,51	7,52	7.52	7.900
Muaro Jambi	7,53	7,53	7,55	7.98	8.020
Tanjung Jabung Timur	6,2	6,2	6,25	6.26	6.300
Tanjung Jabung Barat	7,5	7,5	7,52	7.54	7.580
Tebo	6,8	6,8	6,88	7.1	7.410
Bungo	7,59	7,59	7,78	8.14	8.160
Kota Jambi	10,1	10,1	10,11	10.11	10.370
Kota Sungai Penuh	-	9,1	9,18	9.19	9.230
<i>Provinsi Jambi</i>	7,63	7,63	7,68	7,84	8,05

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tanjab Timur 2011

3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Nilai sosial budaya yang berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat lokal merupakan aset pembangunan yang tidak terperikan nilainya. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi nilai seni dan budaya cukup besar dengan keragaman yang sangat tinggi. Potensi seni yang berkembang di daerah ini diantaranya adalah seni musik daerah, nyanyian-nyanyian daerah, tarian daerah, kesenian bernuansa islami, dan berbagai bentuk seni tradisional lainnya. Sedangkan atraksi budaya dan objek wisata merupakan modal dasar dalam pengembangan perekonomian kerakyatan dimasa mendatang. Berbagai atraksi dan objek wisata yang perlu dikelola dan dikembangkan diantaranya adalah Taman Nasional Berbak, Mandi Syafar, dan Makam Orang Kayo Hitam.

Tabel 2.8 berikut menggambarkan perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012.

Tabel 2. 8

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2010 s.d Tahun 2012
Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Capaian Pembangunan (Kecamatan)	2012			
		Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	16	1	50	5
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	32	1	50	3
3	Kecamatan Mendahara	27	1	45	2
4	Kecamatan Mendahara Ulu	21	0	40	2
5	Kecamatan Geragai	16	0	45	1
6	Kecamatan Dendang	11	0	45	1
7	Kecamatan Kuala Jambi	8	0	50	1
8	Kecamatan Sadu	9	0	40	1
9	Kecamatan Nipah Panjang	28	1	50	2
10	Kecamatan Berbak	9	0	35	2
11	Kecamatan Rantau Rasau	29	0	35	2
JUMLAH		206	4	485	22
2011		187	4	485	22
2010		191	4	480	22

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Timur

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu, peningkatan mutu

pendidikan harus terus menerus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan besaran penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah, dan merupakan ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah.

Angka partisipasi merupakan perbandingan antara siswa dan penduduk usia sekolah. Penduduk usia sekolah dasar adalah anak umur 7 s.d. 12 tahun. Penduduk usia sekolah lanjutan pertama adalah anak umur 13 s.d. 15 tahun. Penduduk usia sekolah lanjutan atas adalah remaja umur 16 s.d. 18 tahun. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010 s.d 2012
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012
1.	SD/MI			
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	22,822	23,281	23,625
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	24,108	24,139	24,362
1.3.	APS SD/MI	94.67	96.45	96.97
2.	SMP/MTs			
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	7,086	8,833	8,978
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	11,162	11,291	11,444
2.3.	APS SMP/MTs	63.48	78.23	78.45

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 2.10

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012
Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah murid Usia 7-12 Th	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	2,044	1,913	106.85	609	840	72.50
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	3,492	3,527	99.01	1,371	1,667	82.24
3	Kecamatan Mendahara	2,345	1,766	132.79	845	1,364	61.95
4	Kecamatan Mendahara Ulu	2,170	2,493	87.04	506	758	66.75
5	Kecamatan Geragai	2,762	2,951	93.60	1,088	1,137	95.69
6	Kecamatan Dendang	772	1,185	65.15	665	867	76.70
7	Kecamatan Kuala Jambi	1,806	1,856	97.31	657	849	77.39
8	Kecamatan Sadu	1,551	1,788	86.74	446	661	67.47
9	Kecamatan Nipah Panjang	3,013	3,068	98.21	1,127	1,515	74.39
10	Kecamatan Berbak	1,131	1,317	85.88	508	530	95.85
11	Kecamatan Rantau Rasau	2,539	2,498	101.64	1,156	1,256	92.04
	JUMLAH	23,625	24,362	96.97	8,978	11,444	78.45

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari tabel 2.9 dan 2.10 di atas, Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menunjukkan trend meningkat. Jika dilihat pencapaian APS SD/ sederajat sampai dengan tahun 2012 (proyeksi) yang mencapai 96,97%, hal ini menunjukkan bahwa masih ada 3,03% penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Sedangkan angka APS tingkat SMP/ sederajat mencapai 78,45% pada tahun 2012 (proyeksi), maka dapat dikatakan bahwa penduduk berusia 13-15 tahun masih ada 21,55% yang tidak bersekolah.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Informasi rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah sangat penting dalam penentuan rencana kerja pemerintah di sektor pendidikan. Dengan informasi ini, pemerintah akan dapat menentukan kebutuhan sekolah berdasarkan penduduk usia sekolah tertentu. Secara lebih rinci, gambaran rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel 2.11 dan 2.12 berikut :

Tabel 2.11

Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010 s.d 2012

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012
1	SD/MI			
1.1.	Jumlah gedung sekolah	230	230	230
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	24,069	24,139	24,362
1.3.	Rasio	95.559	95.281	94.409
2	SMP/MTs			
2.1.	Jumlah gedung sekolah	74	74	76
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	11,212	11,291	11,444
2.3.	Rasio	66.001	65.539	66.410

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 2.12

Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010 s.d tahun 2012
Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	15	1,913	78.411	4	840	47.619
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	27	3,527	76.552	13	1,667	77.984
3	Kecamatan Mendahara	27	2,951	91.494	9	1,364	65.982
4	Kecamatan Mendahara Ulu	10	1,788	55.928	7	758	92.348
5	Kecamatan Geragai	24	2,493	96.270	8	1,137	70.361
6	Kecamatan Dendang	18	1,856	96.983	5	867	57.670
7	Kecamatan Kuala Jambi	14	1,766	79.275	7	849	82.450
8	Kecamatan Sadu	19	1,317	144.267	5	661	75.643
9	Kecamatan Nipah Panjang	30	3,068	97.784	8	1,515	52.805
10	Kecamatan Berbak	14	1,185	118.143	5	530	94.340
11	Kecamatan Rantau Rasau	32	2,498	128.102	5	1,256	39.809
JUMLAH		230	24,362	94.409	76	11,444	66.410
2011		230	24,139	95.281	74	11,291	65.539
2010		230	24,069	95.559	74	11,212	66.001

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari tabel 2.11 dan 2.12 di atas, ketersediaan sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggambarkan keadaan dimana sarana sekolah formal sudah tersebar di Desa/ Kelurahan di 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun demikian, masih ada dua desa yang belum memiliki SD yaitu Desa Sungai Benuh Kecamatan Sadu dan Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi (hanya ada MI).

c. Rasio Guru

Rasio guru merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid pada masing-masing jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Menurut Seno (1983) dalam BPS (1990), rasio murid-guru yang ideal untuk jenjang SD sampai SLTA adalah 1:18. Artinya dalam 18 murid dibutuhkan seorang guru. Memperhatikan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa rasio murid-guru pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah berada pada kondisi yang ideal, karena rasio guru dan siswa untuk tingkat SD adalah 1:17, namun untuk jenjang SMP adalah 1:20 (kurang ideal). Secara lebih rinci, gambaran rasio guru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel 2.13 dan 2.14 berikut :

Tabel 2.13

Perkembangan Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 s/d 2012

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012
1	SD/MI			
1.1.	Jumlah Guru	1,593	1,605	1,539
1.2.	Jumlah Murid	27,659	27,037	25,748
1.3.	Rasio	1:17	1:17	1:17
2	SMP/MTs			
2.1.	Jumlah Guru	480	491	480
2.2.	Jumlah Murid	9,522	9,584	9,522
2.3.	Rasio	1:20	1:20	1:20

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 2.14

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012
Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2	3	4	(5=3:4)	6	7	(8=6:7)
1	Kecamatan Ma. Sabak Barat	134	2,146	1:16	39	655	1:17
2	Kecamatan Ma. Sabak Timur	189	3,669	1:19	67	1,475	1:22
3	Kecamatan Mendahara	111	3,390	1:31	35	910	1:26
4	Kecamatan Mendahara Ulu	72	2,281	1:32	32	544	1:17
5	Kecamatan Geragai	200	2,902	1:15	58	1,172	1:20
6	Kecamatan Dendang	117	810	1:07	48	715	1:15
7	Kecamatan Kuala Jambi	99	1,898	1:19	27	708	1:26
8	Kecamatan Sadu	82	1,630	1:20	36	480	1:13
9	Kecamatan Nipah Panjang	211	3,166	1:15	72	1,212	1:17
10	Kecamatan Berbak	67	1,188	1:18	27	547	1:20
11	Kecamatan Rantau Rasau	257	2,668	1:10	50	1,244	1:25
JUMLAH		1,539	25,748	1:17	491	9,662	1:20

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kesehatan

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perkembangan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan semakin membaiknya beberapa indikator, secara lebih rinci dapat disajikan pada tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15

Perkembangan Sektor Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2012

NO	URAIAN	2011	2012
1	Angka harapan hidup	70,41 tahun	71,19 tahun
2	AKBA (CMR)	28,34/1000	24,25/1000
3	AKB (IMR)	34,83/1000	22,56/1000
4	AKI (MMR)	238,5/1000	225,6/1000
5	Cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan	91.99%	87.67%
6	Prevalensi balita dengan berat badan rendah	0.80%	0.37%
7	Prevalensi balita gizi buruk	0.14%	0.28%
8	Prevalensi balita gizi kurang	1.99%	1.04%
9	Persentase balita mendapat ASI eksklusif	34.50%	35%
10	Persentase kecamatan rawan gizi	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan uraian di atas dan sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur optimis dapat mencapai target MDG's (tujuan pembangunan millenium) pada tahun 2015, karena program yang dilaksanakan selama ini sudah dalam jalur yang tepat, dan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan.

Berikut digambarkan kinerja dan perkembangan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2010-2012 pada tabel 2.16 dibawah ini :

Tabel 2.16

Perkembangan Pelayanan Pada RSUD Nurdin Hamzah
Tahun 2010 s/d Tahun 2012

URAIAN	TAHUN		
	2010	2011	2012
Bed Occupation Rate (%)	17.7	16.37	25.53
Length of Stay (Hari)	3	3	3
Bed Turn Over (Kali)	31	31	35
Turn Over Interval (Hari)	9	10	7
Net Death Rate (%)	1.5	1	1.63
Gross Death Rate (%)	0.015	1.27	1.4
Jumlah Tempat Tidur (Unit)	41	45	43
Jumlah Kematian (Jiwa)	20	18	23
Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa)	8,811	9,167	10,575
Jumlah Rawat inap/in patient (Jiwa)	1,078	1,580	1,589

Sumber : RSUD Nurdin Hamzah

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak jumlah investor berskala nasional, maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berupa keterkaitan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Penanaman modal asing adalah (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Perkembangan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 2.17

Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2007 s.d 2012
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
1	2	3	4	(5=3+4)
2007	Jumlah Investor	1	0	1
2008	Jumlah Investor	0	3	3
2009	Jumlah Investor	0	0	0
2010	Jumlah Investor	1	1	2
2011	Jumlah Investor	0	2	2
2012	Jumlah Investor	1	0	1

Sumber data :BKPM RI (Rekonsiliasi Data Realisasi Penanaman Modal dengan PDPPM di daerah TA. 2012).

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/ PMA dihitung dengan menjumlahkan realisasi nilai proyek investasi PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Secara terperinci, jumlah nilai investasi PMDN dan PMA Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18

Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2007 s.d 2012
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (\$)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (\$)
2007	1	709,935.00	1	709,935.00
2008	3	81,803.30	3	81,803.30
2009	0	0	0	0
2010	2	250,521.10	2	250,521.10
2011	2	46,666.70	2	46,666.70
2012	1	288,689.80	1	288,689.80

Sumber data : BKPM RI (Rekonsiliasi Data Realisasi Penanaman Modal dengan PDPPM di daerah Tahun Anggaran 2012).

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel. 2.19
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010 s/d 2012
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	URAIAN	2010	2011	2012
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	673	204	757
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	5	1	2
3	Rasio daya serap tenaga kerja	134,6	204	378,5

Dari tabel 2.19 terlihat bahawa rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai trend positif. Pada tahun 2010 mempunyai daya serap tenaga kerja 134,6 meningkat menjadi 204 pada tahun 2011 dan pada 2012 sebesar 378,5

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita)

Secara garis besar kebutuhan Rumah Tangga dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar yaitu Kebutuhan akan Pangan dan Kebutuhan Non Pangan. Dengan demikian, pada tingkat pengeluaran tertentu, rumah tangga akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kedua kebutuhannya tersebut.

Secara alamiah, kuantitas pangan yang dibutuhkan seseorang akan mencapai titik jenuh dibandingkan dengan kebutuhan non pangan, termasuk kualitas pangan tidak terbatas dengan cara yang sama. Dengan demikian, besaran pendapatan (yang diproksi dengan pengeluaran total) yang dibelanjakan untuk pangan dari suatu rumah tangga dapat digunakan sebagai petunjuk tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut Atau dengan kata lain semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan, berarti semakin kurang tingkat kesejahteraan

rumah tangga yang bersangkutan, Sebaliknya semakin kecil pangsa pengeluaran pangan maka rumah tangga tersebut akan tampak semakin sejahtera.

Menurut data hasil SUSENAS 2011, terlihat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai golongan pengeluaran perkapita perbulan antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 499.999,- mencapai 40,97% penduduk; dan yang mempunyai golongan pengeluaran perkapita perbulan antara Rp. 500.000,- s.d Rp. 749.999,- sekitar 23,19% penduduk; sementara yang mempunyai golongan pengeluaran perkapita perbulan antara Rp. 200.000,- s.d Rp. 299.000,- sekitar 19,14% penduduk; sekitar 8,21% penduduk tergolong pada pengeluaran perkapita perbulan berkisar antara Rp. 750.000,- s.d Rp. 999.000; dan sekitar 5,86% penduduk tergolong pada pengeluaran perkapita perbulan antara Rp. 1.000.000,- atau lebih, sementara sisanya mempunyai pengeluaran perkapita perbulan 150.000 atau kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.20

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan, Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011

INTERVAL PENGELUARAN PERKAPITA SEBULAN (Rp)	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE
1	2	3
< 100.000	-	0,00
100.000 - 149.999	627	0,30
150.000 - 199.999	4,906	2,33
200.000 - 299.999	40,286	19,14
300.000 - 499.999	86,200	40,97
500.000 - 749.999	48,792	23,19
750.000 - 999.999	17,287	8,21
≥ 1.000.000	12,322	5,86
JUMLAH	210,420	100,00

Sumber : Susenas 2011, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibanding dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai tukar petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk yang dihasilkan, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (I_t) dan yang dibayar (I_b) petani.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di sembilan Kabupaten dalam Provinsi Jambi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi pada bulan Desember 2012, NTP Provinsi Jambi turun sebesar 0,46% dibanding bulan sebelumnya yaitu dari 91,06 % menjadi 90,64% pada Desember 2012. Hal ini disebabkan kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih kecil dari kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian.

Secara terperinci Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi Per Subsektor Desember 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi Jambi Per Subsektor Desember 2012

NO	SUBSEKTOR	BULAN		PERSENTASE
		NOVEMBER	DESEMBER	PERUBAHAN
1	Tanaman Pangan			
	a. Indeks yang Diterima (It)	122.67	122.76	0.07
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	137.77	138.07	0.22
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	89.04	88.91	-0.15
2	Hortikultura			
	a. Indeks yang Diterima (It)	119.09	120.08	0.83
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	136.03	136.34	0.23
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	87.55	88.07	0.60
3	Tanaman Perkebunan Rakyat			
	a. Indeks yang Diterima (It)	126.69	125.4	-1.01
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	137.54	137.94	0.29
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	92.11	90.91	-1.30
4	Peternakan			
	a. Indeks yang Diterima (It)	130.25	130.44	0.14
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	131.25	131.43	0.14
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	99.24	99.25	0.01
5	Perikanan			
	a. Indeks yang Diterima (It)	119.37	120.01	0.54
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	131.22	131.26	0.03
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	90.97	91.43	0.51
Propinsi Jambi				
	a. Indeks yang Diterima (It)	124.31	124.03	-0.22
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	136.51	136.83	0.23
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	91.06	90.64	-0.46

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi 2012.

Dari tabel 2.21 di atas, pada bulan Desember 2012 NTP dua subsektor turun, yaitu subsektor Tanaman Pangan turun sebesar 0,15%. dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun sebesar 1,30%. Sedangkan NTP pada tiga subsektor yang lain mengalami kenaikan, yaitu subsektor Hortikultura naik sebesar 0,60%, subsektor Peternakan naik sebesar 0,01%, dan subsektor Perikanan sebesar 0,51%.

2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

a. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perencanaan Tata Ruang merupakan salah satu hal penting dalam proses Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan Wilayah serta pemanfaatan sumberdaya, baik itu berskala nasional, regional maupun lokal. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup azas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, berkelanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam kabupaten yang bersangkutan maupun dengan kabupaten sekitarnya.

Pola Ruang merupakan rencana alokasi penggunaan ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan potensial sebagai kawasan lindung dan kawasan pengembangan budidaya pertanian/non pertanian. Penataan ruang diarahkan untuk :

- Kawasan Lindung yaitu kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budidaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
- Kawasan Budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, Kawasan Strategis ditetapkan sebagai berikut :

1. Kawasan strategis nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi Kawasan Taman Nasional Berbak di Kecamatan Berbak.
2. Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

- a. kawasan Perkotaan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur;
 - b. kawasan Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - c. kawasan Perindustrian Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - d. kawasan Rantau Rasau dan sekitarnya di Kecamatan Rantau Rasau;
 - e. kawasan Nipah Panjang dan sekitarnya di Kecamatan Nipah Panjang;
 - f. kawasan Pulau Berhala di Kecamatan Sadu; dan
 - g. Kawasan strategis perindustrian provinsi dan kabupaten berupa rencana pengembangan kawasan ekonomi di Kecamatan Sadu.
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi meliputi Kawasan Strategis Industri Pertambangan Minyak dan Gas Geragai yang terletak di Kecamatan Geragai.

b. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumberdaya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan baik pada kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman.

Berdasarkan fungsinya kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan dan peternakan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan, kawasan wisata, kawasan pelabuhan dan kawasan industri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas masing-masing Kelompok Kawasan Budidaya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22

Rencana Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 – 2031

No	Jenis Kawasan	Perkiraan Luas (Ha)	% thd luas Kaw. Budidaya	Keterangan
1	Hutan Produksi	54,936.00	15.64	
2	Perkebunan	153,560.00	43.71	
3	Pertanian Lahan Kering	100,677.00	28.65	
4	Pertanian Lahan Basah	33,457.40	9.52	
5	Peternakan	-	-	Dikembangkan secara terpadu dalam peruntukan lahan perkebunan dan atau pertanian lahan kering
6	Perikanan	-	-	Dikembangkan secara terpadu dalam peruntukan lahan basah dan atau area laut
7	Permukiman Perkotaan	3,039.00	0.86	
8	Permukiman Perdesaan	4,005.00	1.14	
9	Kawasan Industri	1,120.00	0.32	
10	Kawasan Pariwisata	200.00	0.06	
11	Kawasan Pertambangan	-	-	Dikembangkan secara terpadu dalam peruntukan lahan budidaya
12	Kawasan Pelabuhan	350.00	0.10	
LUAS KAWASAN BUDIDAYA		351,344.40	100.00	

Sumber :Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012

Fokus Iklim Investasi

Untuk menarik para investor agar semakin meningkatkan investasinya di daerah, sangat dipengaruhi oleh faktor ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah, selain itu dipengaruhi pula oleh tingkat keamanan suatu daerah, kecilnya jumlah demonstrasi di suatu daerah, dan hal yang tidak kalah penting adalah kemudahan perizinan dan kebijakan tarif pajak daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana gambaran pelaksanaan RKPD yang diperoleh dan gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJM yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan terhadap arah kebijakan, sektor-sektor mana yang harus dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan kapasitasnya.

Untuk menelaah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun sebelumnya dapat lihat dari :

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengefektifkan evaluasi realisasi program atau kegiatan atas target kinerja hasil yang direncanakan, perlu dilakukan pengklasifikasian menurut urusan pemerintah yang terbagai menjadi 2 urusan yaitu, urusan wajib dan urusan pilihan. Secara terperinci, evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan Kabupaten Tanjung Tabung Timur sampai dengan Tahun Berjalan dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut :

TABEL 2. 23
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	URUSAN WAJIB										
I	PENDIDIKAN										
1	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Angka rata-rata Lama Sekolah	8.25 Tahun	6.65 Tahun	6.82 Tahun	7 Tahun	102.64	7.16 Tahun	7.16 Tahun	86.79	DINAS PENDIDIKAN
2	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Angka Melek Huruf	0.962	72.5 %	93.4 %	96.02 %	102.81	93.9 %	98.14 %	102.02	DINAS PENDIDIKAN
3	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Angka rata-rata Lama Sekolah	8.25 Tahun	6.65 Tahun	6.82 Tahun	7 Tahun	102.64	7.16 Tahun	7.16 Tahun	86.79	DINAS PENDIDIKAN
		APK SMA Sederajat	85.75 %	71.8 %	73.5 %	70.62 %	96.08	76 %	76 %	88.63	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/Sederajat	Meningkat Signifikan	Meningkat	Meningkat	99.85 %	99.85	99.9 %	99.9 %	99.9	DINAS PENDIDIKAN
4	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Masyarakat tidak mampu/ korban bencana mendapat akses mengikuti pendidikan	100 %	Ada Akses	Ada Akses	Ada Akses	100	Ada Akses	Ada Akses	50	DINAS PENDIDIKAN
5	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	Penyandang Cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	Meningkat 50 % dari 2011	27.7 %	Ada	39 Siswa	100	Ada	Ada		DINAS PENDIDIKAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil	50 %	15 %	20 %	22.5 %	112.5	25 %	25 %	50	DINAS PENDIDIKAN
7	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas belajar dan mengajar, serta pengelolaan pendidikan	Meningkat 50 % dari 2011	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	DINAS PENDIDIKAN
		Terbentuknya Perda tentang Sistem Pelayanan Pendidikan	Adanya Perda	Belum ada Ranperda	1 Perda	1 Ranperda	50	1 Perda	1 Perda	100	DINAS PENDIDIKAN
		Berdirinya Perguruan Tinggi	Adanya Perguruan Tinggi	Persiapan	Persiapan	1 Perguruan Tinggi	100	1 Perguruan Tinggi	1 Perguruan Tinggi	100	DINAS PENDIDIKAN
		Adanya tenaga profesional D-III Ilmu Perikanan	12 Orang	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	0	Ada	Ada	100	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Jumlah Mahasiswa S1, S2 dan S3 yang berasal dari Tanjab Timur	Meningkat Signifikan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	12:02:01	12:02:01	100	DINAS PENDIDIKAN
II	KESEHATAN										
1	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100 %	Cukup	95 %	96 %	101.05	98 %	98 %	98	DINAS KESEHATAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RPKD TAHUN 2012	REALISASI RPKD TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah PUSKESMAS	20 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100	17 Unit	17 Unit	85	DINAS KESEHATAN
3	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah PUSKESMAS	20 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100	17 Unit	17 Unit	85	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Puskesmas Pembantu	75 Unit	61 Unit	61 Unit	57 Unit	93.44	64 Unit	64 Unit	85	DINAS KESEHATAN
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Bidan	220 Org	149 Org	163 Org	224 Org	137.42	179 Org	179 Org	81	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Perawat	220 Org	151 Org	165 Org	215 Org	130.30	181 Org	181 Org	82	DINAS KESEHATAN
5	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Jumlah Dokter per Puskesmas	3/Puskesmas	1.94	2.1	1.7	80.95	2.3	2.3	74	DINAS KESEHATAN
6	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rasio penduduk dengan Bidan	1 ; 1000	1 ; 1396	1 ; 1297	1 ; 979	132.48	1 ; 1198	1 ; 1198	119.8	DINAS KESEHATAN
7	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	74.30	71.9	72.2	71.91	99.60	72.6	72.6	97.71	DINAS KESEHATAN
8	Program perbaikan gizi masyarakat										
9	Program pengembangan lingkungan sehat										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Indeks Pembangunan Manusia	74.30	71.9	72.2	71.91	99.60	72.6	72.6	97.71	DINAS KESEHATAN
11	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin										
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dan balita										
13	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan										
14	Program peningkatan sistem informasi kesehatan										
15	Program pengembangan kesehatan										
16	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	RTS Miskin	3.191 RT	6168 RT	5.954 RT	5.954 RT	100	5.954 RT	5.954 RT	53.59	DINAS KESEHATAN
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan ibu dan anak	AKB 23/1000 klh	28.34/1000 klh	26.09/1000 klh	22.56/1000 klh	86.47	25.04/1000 klh	25.04/1000 klh	91.85	DINAS KESEHATAN
18	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100 %	Cukup	95 %	96 %	101.05	98 %	98 %	98	RSUD NURDIN HAMZAH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata										
20	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan										
21	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah Dokter	51 Org	33 Org	36 Org	29 Org	80.56	39 Org	39 Org	76	RSUD NURDIN HAMZAH
22	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Rasio penduduk dengan Perawat	1.000	1377	1281			1185	1185	84	RSUD NURDIN HAMZAH
23	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Indeks pembangunan Manusia	74.30	71.9	72.2	71.91	99.60	72.6	72.6	97.71	RSUD NURDIN HAMZAH
		RTS-Miskin	3.191 RT	6168 RT	5954 RT	5.954 RT	100	5954 RT	5.954 RT	53.59	
III	PEKERJAAN UMUM										
1	Program pembangunan jalan dan jembatan.	Panjang Jalan Kabupaten	1.000 Km	940.55 Km	949 Km	955.4 Km	100.67	963.56 Km	963.56	96.36	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	80.50 %	22.43 %	32.6 %	46.05 %	141.26	44.7 %	44.7 %	55.53	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Program	Terhubungnya	100 %	60.1 %	71.16 %	75.03 %	105.44	78.9 %	78.9 %	78.90	DINAS

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan -Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik									PEKERJAAN UMUM
		Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	MENINGKAT	MENINGKAT	Ada Pelayanan perintis	12 Mobil Pick Up; 9 truk PS ; 1 Kapal Roro	80	Ada Pelayanan perintis	Ada Pelayanan perintis	80	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	68.87 %	10.1 %	15.75 %	15.75 %	100	30 %	30 %	43.56	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	95 %	60 %	70 %	72.5 %	103.57	75 %	75 %	78.95	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Program pembangunan jalan dan jembatan. - Lanjutan pembangunan jembatan Muara Sabak	Ada Komunikasi dua arah yang efektif	Adanya Komunikasi	Belum terealisasi	Efektif	Belum Efektif	0	Efektif	Efektif	50	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Program	Persentase rumah	94.00 %	88.63 %	87.6 %	89.23 %	101.86	90.85 %	90.85 %	96.65	DINAS

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RPKD TAHUN 2012	REALISASI RPKD TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pembangunan infrastruktur perdesaan - penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	sehat									PEKERJAAN UMUM
7	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.	Akses sanitasi layak	65.50 %	30.01 %	41.7 %	44.45 %	106.59	47.2 %	47.2 %	72.06	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	Program pengembangan kemitraan pembanguan perumahan	Adanya pola kemitraan	Adanya Kemitraan		Ada	2 Pengembangan Perumahan	100	Ada	Ada	100	DINAS PEKERJAAN UMUM
IV	PENATAAN RUANG										
1	Program pemanfaatan ruang.	Persentase rumah sehat	94.00	88.63 %	87.6 %	89.23 %	101.86	90.85 %	90.85 %	96.65	DINAS TATA KOTA
2	Program pengendalian pemanfaatan ruang										
3	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.	Kualitas layanan	95.00	74.83 %	74.74 %	75.79 %	101.40	76.83 %	76.83 %	80.87	DINAS TATA KOTA

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
1	Program perencanaan tata ruang.	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	Adanya Masterplan Pendukung	Ada Dokumen	Ada Dokumen	2 Dokumen	100	Ada	Ada	100	BAPPEDA
2	Program pemanfaatan ruang.										
3	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.										
4	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam										
5	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Kawasan ekonomi strategis	6 Wilayah Pertumbuhan	Ada							
6	Program perencanaan pembangunan ekonomi - Pengembangan e-Government	Pengembangan sistem jaringan e-government	Kapasitas Jaringan 10 MBps	4 MBps	Dikembangkan	6 MBps	100	Dikembangkan	6 MBps	60	BAPPEDA
7	Program pengembangan data/informasi	Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	Terintegrasinya sistem aplikasi bid. Perenc & anggaran	Belum	Dikembangkan Pely. Publik dgn Sist. aplikasi	1 Website	100	Dikembangkan Pely. Publik dgn Sist. aplikasi	Dikembangkan Pely. Publik dgn Sist. aplikasi	100	BAPPEDA
8	Program perencanaan pembangunan ekonomi - Pengembangan e-Government	Sistem informasi daerah berbasis website	75% SKPD Telah memliki Website	Ada	Ada	1 Website	100	Ada	Ada	100	BAPPEDA

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Program peningkatan promosi dan kerjasama daerah	Pelayanan satu pintu	40 Jenis	31 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	100	29 Jenis	33 Jenis	82.50	BAPPEDA
10	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Nilai Investasi (Rp)	Meningkat 100% dari Tahun 2011	13.471 Juta	16.303 Juta	136.862 Juta	839.49	140.283 Juta	140.283 Juta	520.69	BAPPEDA
11	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Kesejahteraan masyarakat sekitar tambang (Implementasi CSR)	Bantuan Listrik 900 RT, ternak 250 Ekor, Jalan & Jembatan	47 Sapi	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 43 Ekor, Jalan & Jembatan	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan, srta sarana pely publik	80	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan, srta sarana pely publik	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan, srta sarana pely publik		BAPPEDA
12	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	Adanya masterplan pendukung	Persiapan	Bertahap	1 Kawasan	100	Bertahap	1 Kawasan	100	BAPPEDA
13	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Terpenuhi	Ada	5 Dokumen	100	Ada	Ada	100	BAPPEDA
14	Program perencanaan sosial budaya										
15	Program perencanaan pembangunan ekonomi										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan LH										
17	Program perencanaan pengembangan pemanfaatan ruang										
18	Program perencanaan tataruang										
19	Program perencanaan pembangunan daerah	Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	Meningkat	Ada	Meningkat	3 Kali	100	Meningkat	Meningkat	100	BAPPEDA
20	Program perencanaan pengembangan pemanfaatan ruang										
21	Program perencanaan tataruang	Jelasnya zonasi	Dokumen Pengembangan, pengelolaan kawasan sungai, danau & Sumber daya air berbasis DAS.	Ada	Adanya RTRW dan Zonasi Kawasan Konservasi	1 perda tentang RTRW	100	Adanya RTRW dan Zonasi Kawasan Konservasi	Ada	100	BAPPEDA
22	Program Penelitian dan Pengembangan	Dokumen-dokumen penelitian di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur yang aplikatif	Tersedianya Dokumen penelitian yg mendukung pembangunan daerah	Belum ada penelitian	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	KANTOR LITBANGDA
VI	PERHUBUNGAN										
1	Program pembangunan sarana	Revitalisasi Sungai dan transportasi	70% Telah Direvitalisasi	0.2	28 %	35 %	125	42 %	42 %	60	DISHUBKOM INFO

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan prasarana perhubungan	sungai dan laut									
		Meningkatnya pangsa pengguna transportasi sungai dan laut	50% Lebih Tinggi dari tahun 2011	Berangkat 3.262, Datang 3.117	12 %	13.94 %	116.17	Meningkat 10% dari tahun 2012	15.33%	85.19	DISHUBKOM INFO
2	Program peningkatan pelayanan angkutan	Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi	50% Lebih rendah dari thn 2011	Ada	Menurun	Menurun	100	Menurun 10% dari tahun 2012	Menurun	50	DISHUBKOM INFO
3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Sistem informasi daerah berbasis website	75% SKPD Telah memlki Website	Ada	Ada	1 Website	100	Ada	Ada	100	DISHUBKOM INFO
4	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Keterpaduan sistem jaringan modaL transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	Adanya Sinergitas Sarana Moda Transportasi utk Pely. Kepariwisataan di Tanjab Timur	Diprogramkan	Diprogramkan	50 %	50	Diprogramkan	Diprogramkan	50	DISHUBKOM INFO
VII	LINGKUNGAN HIDUP										
1	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sda dan lingkungan hidup	Jumlah penyuluhan utk kesadaran	Frekuensi 24 kali	12 KALI	Meningkat	Meningkat	100	2 kali	Meningkat	50	KANTOR LH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kesejahteraan masyarakat sekitar tambang (Implementasi CSR)	Bantuan Listrik 900 RT, ternak 250 Ekor, Jalan & Jembatan	47 Sapi	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 43 Ekor, Jalan & Jembatan	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan, srta sarana pely publik	80	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan, srta sarana pely publik	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan, srta sarana pely publik		KANTOR LH
		Tingkat pencemaran, Kerusakan lingkungan	Minimalisasi tingkat pencemaran lingkungan	Menurun	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	100	KANTOR LH
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	Minimalisasi tingkat pencemaran lingkungan	Menurun	Menurun	0 Kali	100	Menurun	Menurun	100	KANTOR LH
3	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sda dan lingkungan hidup	Sosialisasi	11 Kali	8 Kali	Meningkat	Meningkat	100	2 Kali	11 Kali	100	KANTOR LH
4	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
5	Program pengendalian pencemaran dan	Masyarakat peduli lingkungan	Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	KANTOR LH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	perusakan lingkungan.	Pelanggar hukum	Menurun 50% dari Tahun 2011	Berkurang	Berkurang	0 Kasus	100	Menurun dari tahun 2012	Berkurang	100	KANTOR LH
VIII	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Program penataan administrasi kependudukan	Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	e - KTP terlaksana dengan optimal	Persiapan	Terlaksananya E - KTP	11 Kecamatan	100	Ada	Ada	100	DINAS DUKCAPIL
IX	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	Peningkatan peran-peran perempuan di desa	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	BPPKB
2	Program keluarga berencana	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	100 %	25 %	40 %	45 %	112.50	50 %	40 %	40.00	BPPKB
3	Program kesehatan reproduksi remaja	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	85 %	65 %	75 %	75 %	100	78 %	72 %	84.71	BPPKB
4	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	100 %	11.67 %	40 %	40 %	100	40 %	40 %	40.00	BPPKB
		cakupan penyediaan alat dan obat	30 %	30 %	30 %	30 %	100	30 %	30 %	100	BPPKB

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyrkt. sebesar 30%									
5	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		100 %	20 %	40 %	45 %	112.50	50 %	40 %	40.00	BPPKB
6	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	BPPKB
7	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Kesehatan ibu dan anak	AKB 23/1000 klh	28.34/1000 klh	26.09/1000 klh	22.56/1000 klh	86.47	25.04/1000 klh	25.04/1000 klh	91.85	BPPKB
8	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga										
9	Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Advokasi perlindungan perempuan dan anak	Penurunan kasus pelecehan seksual dan traficing	Meningkat	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	BPPKB
10	Program penguatan										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2012	REALISASI RKPD TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.										
11	Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	BPPKB
12	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.										
X	TENAGA KERJA										
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Berfungsinya BLK	BLK berfungsi optimal	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	DINAS SOSNAKERTRANS
		Jumlah TK yg terserap	300 Org	50 Org	1.190 Org	4.127 Org	346.81	50 Org	4.227 Org	1409.00	DINAS SOSNAKERTRANS
2	Program perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	UMR	Rp. 1.500.000	Rp. 1.028.000	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000	100	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000	73.33	DINAS SOSNAKERTRANS
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Jumlah Pelatihan	13 Kali	Ada	6 Kali	6 Kali	100	2 Kali	8 Kali	61.54	DINAS SOSNAKERTRANS

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RPKD TAHUN 2012	REALISASI RPKD TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Kota Mandiri Terpadu	Optimalisasi kawasan KTM	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	100	1 Kawasan	1 Kawasan	100	DINAS SOSNAKERTRANS
5	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jenis dan jumlah Kegiatan	Penyandang Cacat, Lansia, Fakir Miskun	Meningkat	Meningkat	4 Jenis Bantuan	100	Meningkat	Meningkat	100	DINAS SOSNAKERTRANS
6	Program Pembinaan Anak terlantar	Menurunnya Angka Anak terlantar per Tahun	Menurun 50% dari jumlah jlh anak terlantar	25 %	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	50	DINAS SOSNAKERTRANS
		Persentase Perlindungan dan Pembinaan anak terlantar		25 %	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	50	DINAS SOSNAKERTRANS
7	Program Pembinaan para penyandang cacat & trauma	Para Penyandang Cacat di seluruh kecamatan	Terlayannya para penyandang cacat dan trauma pd seluruh kecamatan	Pendataan	Pendataan Penyandang Cacat	Pendataan	100	Pendataan Penyandang Cacat	Pendataan	100	DINAS SOSNAKERTRANS
8	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkobs dan penyalit sosial lainnya)	Persentase penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yg terindikasi penyebarannya	Terbina eks penyandang penyakit sosial sebesar 75% dari jumlah yang ada	Turun 0.45	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	100	DINAS SOSNAKERTRANS

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH										
1	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Pelayanan satu pintu	40 Jenis	31 Jenis	KPPT berfungsi optimal	32 Jenis	100	29 Jenis	29 Jenis	72.50	DINAS KOPERASI UMKM
3	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Kantaya LKPM	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	DINAS KOPERASI UMKM
4	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi umkm										
5	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi										
6	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Jumlah UKM	390 Unit	277 Unit	15835 Unit	3.325 Unit	21.00	352 Unit	352 Unit	90.26	DINAS KOPERASI UMKM
7	Program										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2012	REALISASI RKPD TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Jumlah/UKM yang berperan	390 Unit	97 Unit	15835 Unit	3.325 Unit	21.00	352 Unit	352 Unit	90.26	DINAS KOPERASI UMKM
8	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi umkm										
9	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi										
10	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif										
11	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM										
12	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi umkm										
13	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	UKM Unggulan	75 Unit	14 Unit	15 Unit	22 Unit	146.67	35 Unit	35 Unit	46.67	DINAS KOPERASI UMKM
15	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Akses masyarakat terhadap sumber daya	Meningkat	Ada	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	DINAS KOPERASI UMKM
16	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi handal	76 Unit	97 Unit	272 Unit	112 Unit	41.18	49 Unit	49 Unit	64.47	DINAS KOPERASI UMKM
17	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Lembaga ekonomi mikro	11 Unit	3 Unit	6 Unit	6 Unit	100	3 Unit	3 Unit	27.27	DINAS KOPERASI UMKM
18	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi										
XII	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI										
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	4 Jenis Pelayanan	90	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100	KANTOR SATPOL PP
		Meningkatnya	Meningkatnya	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	KANTOR SATPOL PP

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program pendidikan politik masyarakat	pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	iklim demokrasi di masyarakat								BADAN KESBANGPOL LINMAS
3	Program pengembangan wawasan kebangsaan										BADAN KESBANGPOL LINMAS
4	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan										BADAN KESBANGPOL LINMAS
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan										BADAN KESBANGPOL LINMAS
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan										Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat
6	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	Berkurangnya korban jiwa akibat bencana	Ditanggulangi	Bencana cepat ditanggulangi	100 %	100	Bencana cepat ditanggulangi	Ditanggulangi	100	BADAN KESBANGPOL LINMAS
7	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social	Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	10.286 Orang	Ada	Adanya Santunan	Rp. 280.539.750	100	Adanya Santunan	Ada	100	BADAN KESBANGPOL LINMAS

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIII	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Adanya kemudahan berinvestasi	Kemudahan Pemanfaatan Lahan	Ya	Ya	32 jenis Izin	100	Ya	32 jenis Izin	100	SEKRETARIAT DAERAH
2	Program penyediaan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.										
3	Program penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.										
4	Program penataan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	Jabatan diisi oleh aparaturnya sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	85 %	66 %	69 %	69 %	100	65 %	65 %	76.47	SEKRETARIAT DAERAH
5											
6	Program penataan otonomi daerah	Wilayah daerah tertata sesuai	Terlaksananya Penataan	Meningkat	Sebagian	93 Desa/ kelurahan	100	Sebagian	Meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	Wilayah								
7	Program peningkatan iman dan taqwa.	Insentif Pegawai SARA meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Rp. 600.000,-	100	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Penghargaan bagi Pegawai SARA	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Rp. 600.000,-	100	Ada Penghargaan	Rp. 600.000,-	100	SEKRETARIAT DAERAH
8	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	Adanya Perda	Ada	Ada Perda	Ada Perda	100	Ada Perda	Ada Perda	100	SEKRETARIAT DAERAH
9	Program pengembangan komunikasi, informasi, dokumentasi dan media massa	Sistem informasi daerah berbasis website	75% SKPD Telah memiki Website	Ada	Ada	1 Website	100	Ada	Ada	100	SEKRETARIAT DAERAH
10	Program Kerjasama Informasi dan Mas media										
11	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	PDRB atas harga berlaku	15,95 Juta	12,23 Juta	IDR 11.578.952,19 Juta	IDR 11.036.813,95 Juta	95.32	IDR 11.681.147,17 Juta	IDR 11.036.814 Juta	73236.03	SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	Meningkat	Persiapan	BUMD Masih Dalam Proses	Ada (Perda No.41 Tahun 2001	100	BUMD Masih Dalam Proses	BUMD Masih Dalam Proses	0	SEKRETARIAT DAERAH
		Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	Pendirian BUMDes 50% dari Jumlah Desa yang ada	Persiapan Pembentukan BUMDes	Meningkat	53 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan	100	Meningkat	Meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH
13	Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	Penyelesaian kasus sengketa lahan secara persuasif	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Penyelesaian kasus sengketa	Meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	10 kali pelaksanaan sosialisasi ttg pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Sosialisasi	Meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Kelembagaan yang kapabel	Penguatan peran institusi yg menangani penyelesaian sengketa lahan	Meningkat	Peran Instansi meningkat	Peran Instansi meningkat	100.00	Peran Instansi meningkat	Peran Instansi meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH
14	Program penataan daerah otonomi	Tatacara penyelesaian	Peraturan yg	Ada	Ada kejelasan	Ada kejelasan	100	Ada kejelasan	Ada kejelasan	100	SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		sengketa lahan	mengatur mekanisme penyelesaian sengketa lahan								
15	Program peningkatan kualitas iman dan taqwa generasi qurani	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	Ketentraman dan kerukunan umat beragama di kab. Tanjab Timur	Ada Dukungan	Optimalisasi dukungan pemerintah untuk kegiatan keagamaan	Optimal	100	Optimalisasi dukungan pemerintah untuk kegiatan keagamaan	Optimal	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya pembinaan generasi muda melalui lembaga keagamaan	Keberdayaan organisasi pemuda dan lembaga keagamaan di tiap kecamatan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH
16	Program pembinaan eks penderita penyakit sosial	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Menurunnya angka anak terlantar pertahun	Menurun 50% dari jumlah jlh anak terlantar	25 %	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	50	SEKRETARIAT DAERAH
		Para penyandang cacat di seluruh kecamatan	Terlayannya para penyandang cacat dan trauma pd seluruh kecamatan	Pendataan	Pendataan Penyandang Cacat	Pendataan	100	Pendataan Penyandang Cacat	Pendataan	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Penurunan eks penyandang penyakit	Terbina eks penyandang penyakit sosial	Turun 0.45	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	100	SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	sebesar 75% dari jumlah yang ada								
		Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak Terlantar	Menurun 50% dari jumlah jlh anak terlantar	25 %	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	50	SEKRETARIAT DAERAH
17	Program peningkatan kualitas iman dan taqwa generasi qurani	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	100 %	10 %	Meningkat 10% dari Tahun 2011	20 %	200	Meningkat10 % dari Tahun 2012	30 %	30	SEKRETARIAT DAERAH
18	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	Meningkatnya iklim demokrasi di masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	SEKRETARIAT DPRD
19	Program Pendidikan Kedinasan	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	85 %	66 %	69 %	69 %	100	65 %	65 %	76.47	BKD
20	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur										
21	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	100% hasil pengawasan ditindaklanjuti	Meningkat	Meningkat	85 %	85	Meningkat	85 %	85	BKD
23	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	4 Jenis Pelayanan	90	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100	BKD
		Adanya Prioritas Calon CPNS	Terealisasi	Ada Prioritas	Ada Prioritas	Ada Prioritas	100	Ada Prioritas	Ada Prioritas	100	BKD
24	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	Terealisasi	Disesuaikan	Dijadikan acuan	1 kali ujian kompetensi	100	Dijadikan acuan	1 kali ujian kompetensi	100	BKD
		CPNS yang bebas KKN	Terlaksana	Bebas KKN	Dijadikan acuan	1	100	Dijadikan acuan	1	100	BKD
		TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat terpencil - terpencil - tidak terpencil)	Meningkat	Sudah Mulai	Ada	Rp 38,1 Milyar	100	Ada	Ada	100	BKD
25		Isentif Guru meningkat	Meningkat	Ada	Meningkat	Rp. 32,2 Milyar	100	Meningkat	Meningkat	100	BKD
26	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	Sistem keuangan berbasis e-budget & e-Audit	Meningkat	Meningkat	1 Aplikasi anggaran & 1 Aplikasi Pelaporan Anggaran	100	Ada	1 Aplikasi anggaran & 1 Aplikasi Pelaporan Anggaran	100	DPKAD

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan Pendataan objek pajak dan retribusi daerah)	Sumbangan pertambangan ke PAD (Galian C)	Rp. 1.100.131.000	Rp. 964.207.722	Meningkat	Rp. 1.179.132.891	100	Rp.895.862.000	1.462.403.782	132.93	DPKAD
28	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Peningkatan manajemen aset/barang daerah dan Pengamanan aset milik pemerintah)	Tatacara penyelesaian sengketa lahan	Peraturan yg mengatur mekanisme penyelesaian sengketa lahan	Ada	Ada kejelasan	Ada kejelasan	100	Ada kejelasan	Ada kejelasan	100	DPKAD
29	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	100% hasil pengawasan ditindaklanjuti	Meningkat	Meningkat	85 %	85	Meningkat	85 %	85	INSPEKTORAT
30	Program Peningkatan Profesionalisme	Meningkatnya kapasitas aparatur	Meningkat 50% dari tahun 2011	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	INSPEKTORAT

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	pengawas intern Pelayanan publik bebas dari KKN	Terlaksana	Bebas KKN	Diterapkan Pelayanan Publik Bebas KKN	100 %	100	Diterapkan Pelayanan Publik Bebas KKN	100 %	100	INSPEKTORAT
32	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Perizinan satu pintu	Terstandarnya Sistem Perizinan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	KANTOR PELY.PERIZINAN
33	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan public	Berfungsi Optimal	Berfungsi Optimal	Optimalisasi fungsi KPPT	1 KPPT	100	Optimalisasi fungsi KPPT	1 KPPT	100	KANTOR PELY.PERIZINAN
		Nilai Investasi (Rp)	Meningkat 100% dari Tahun 2011	13.471 Juta	16303 Juta	136862 Juta	839.49	140.283 Juta	140.283 Juta	520.69	KANTOR PELY.PERIZINAN
XIV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
1	Program penguatan otonomi desa	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	Terlaksananya Penataan Wilayah	Meningkat	Sebagian	93 Desa/ kelurahan	100	Sebagian	Meningkat	100	BPMPD/K
2	Program pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Jumlah penyuluhan utk kesadaran	Frekuensi 24 Kali	12 Kali	Meningkat	Meningkat	100	2 Kali	Meningkat	50	BPMPD/K
3	Program Peningkatan	Pengembangan	Adanya	Persiapan	Bertahap	1 Kawasan	100	Bertahap	1 Kawasan	100	BPMPD/K

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	masterplan pendukung								
4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	Meningkat	Ada	Meningkat	3 Kali	100	Meningkat	Meningkat	100	BPMPD/K
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	Pendirian BUMDes 50% dari Jumlah Desa yang ada	Persiapan Pembentukan BUMDes	Meningkat	53 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan	100	Meningkat	Meningkat	100	BPMPD/K
6	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa										
7	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	BPMPD/K
XV	PERPUSTAKAAN										
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas belajar dan mengajar, serta pengelolaan pendidikan	Meningkat 50% dari Tahun 2011	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	KANTOR PERPUSTAKAAN
B	URUSAN PILIHAN										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERTANIAN										
1	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Tersedianya infrastruktur pertanian yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian	Terpenuhinya infrastruktur pertanian	Irigasi Bertambah	Bertambah	Tanggul : 122.930 M	100	Bertambah	Tanggul : 122.930 M		DINAS PERTANIAN
2	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		77.820 M	Irigasi : 77.820 M		Irigasi : 77.820 M					
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase kecukupan pangan	100 %	Meningkat	Meningkat	100 %	100	100 %	100 %	100	DINAS PERTANIAN
		Desa ketahanan pangan	20 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	100	15 Desa	13 Desa	65	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Desa Rawan Pangan	50% Desa Bebas Rawan Pangan	81 Desa	40 Desa	31 Desa	77.5	50 Desa	50 Desa	92	DINAS PERTANIAN
4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Produk Unggulan	13 Jenis	2 Jenis	4 Produk	14 Produk	350	4 Produk	20 Produk	154	DINAS PERTANIAN
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Potensi Lahan	53.739 Ha	41.152 Ha	56919 Ha	56.919 Ha	100	55011 Ha	58.827 Ha	109	DINAS PERTANIAN
6	Program peningkatan kesejahteraan petani										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian	tanaman pangan									PERTANIAN
8	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll (Ha)	Benih Padi 22.000 Ha	Benih Padi 15.000 Ha	Meningkat	Meningkat	100	Benih Padi 1.140 Ha	Meningkat	68	DINAS PERTANIAN
9	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)										
10	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penguatan Kelompok Tani	Kelompok Tani, Gapoktan 93	1.119 Klompk	1119 Klompk	1.159 Klompk	103.57	1119 Klompk	1.119 Klompk	100	DINAS PERTANIAN
11	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Padi	127.154 Ton	10.4011 Ton	36.4 Kwt/Ha	0.326 Kwt/Ha	0.90	119900 Ton	119.900 Ton	94.30	DINAS PERTANIAN
12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Produksi Jagung	6.386 Ton	2.499 Ton	30.2 Kwt/Ha	0.309 Kwt/Ha	1.02	5897.6 Ton	5.897,6 Ton	92.35	DINAS PERTANIAN
13	Pengembangan sumberdaya sarana prasarana pertanian	Terpenuhi sarana prasarana pertanian	Terpenuhi Relatif Merata	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	100	Terpenuhi	Terpenuhi	100	
14	Program pengembangan sumber daya sarana dan prasarana pertanian	Tersedianya infrastruktur pertanian yang dapat meningkatkan produktifitas	Terpenuhinya infrastruktur pertanian	Tanggul Bertambah 122.930 M	Bertambah	Tanggul : 122.930 M Irigasi : 77.820 M	100	Bertambah	Tanggul : 122.930 M Irigasi : 77.820 M		BP4K

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pertanian									
15	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ perkebunan Lapangan	Persentase kecukupan pangan	100 %	Meningkat	Meningkat	100 %	100	100 %	100 %	100	BP4K
		Desa ketahanan pangan	20 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	100	15 Desa	13 Desa	65	BP4K
		Jumlah Desa Rawan Pangan	50% Desa Bebas Rawan Pangan	81 Desa	40 Desa	31 Desa	77.50	50 Desa	50 Desa	92	BP4K
		Luas lahan pertanian tanaman pangan	33.120 Ha	32260 Ha	34840 Ha	31.661 Ha	90.88	32274 Ha	31.048 Ha	94	BP4K
16	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penguatan Kelompok Tani	Kelompok Tani, Gapoktan 93	Pemula 213 BDK 74	1119 Klompk	1159 Klompk	103.57	1119 Klompk	1.119 Klompk	100	BP4K
17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian, perikanan, perkebunan	Jumlah Industri pengolahan hasil pertanian	320 KM	305 KM	305 KM	357 KM	117.05	305 KM	305 KM	95.31	BP4K
18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Persentase kecukupan pangan	100 %	Meningkat	Meningkat	100 %	100	100 %	100 %	100	DINAS PETERNAKAN
		Desa ketahanan pangan	20 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	100	15 Desa	13 Desa	65.00	DINAS PETERNAKAN
		Jumlah Desa Rawan Pangan	50% Desa Bebas Rawan Pangan	81 Desa	40 Desa	31 Desa	77.50	50 Desa	50 Desa	92.00	DINAS PETERNAKAN
19	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Produk Unggulan	13 Jenis	2 Jenis	4 Produk	14 Produk	350	4 Produk	20 Produk	153.85	DINAS PETERNAKAN
20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/	Jumlah Sapi (ekor)	17.000 EKOR	12803 EKOR	13400 EKOR	14.327 EKOR	106.92	14100 EKOR	14.554 EKOR	85.61	DINAS PETERNAKAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	perkebunan)										
21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah Kambing (ekor)	29.000 EKOR	32966 EKOR	26500 EKOR	38.742 EKOR	146.20	27500 EKOR	38.432 EKOR	132.52	DINAS PETERNAKAN
22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah kerbau (ekor)	550 EKOR	520 EKOR	490 EKOR	187 EKOR	38.16	500 EKOR	540 EKOR	98.18	DINAS PETERNAKAN
23	Program pengembangan sumber daya sarana dan prasarana pertanian	Jumlah domba (ekor)	550 EKOR	118 Ton	220 EKOR	116 EKOR	52.73	246 EKOR	250 EKOR	45.45	DINAS PETERNAKAN
24	Program pengembangan sumber daya sarana dan prasarana pertanian	Terpenuhi sarana prasarana pertanian	Terpenuhi Relatif Merata	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	100	Terpenuhi	Terpenuhi	100	DINAS PETERNAKAN
25	Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	Pencegahan penularan penyakit ternak	Penanganan Penyakit Ternak dengan baik	Meningkat	Meningkat	1 Paket Vaksin	100	1 Paket Vaksin	1 Paket Vaksin	100	DINAS PETERNAKAN
26	Peningkatan Pemasaran Hasil Poduksi Peternakan	fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	Pasar Hewan yang representatif	Meningkat	Meningkat	2 Unit Pasar Hewan	100	1 Unit Pasar Hewan	3 Unit Pasar Hewan	100	DINAS PETERNAKAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Persentase kecukupan pangan	100 %	Meningkat	Meningkat	100 %	100	100 %	100 %	100	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		Desa ketahanan pangan	20 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	100	15 Desa	13 Desa	65	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		Lembaga distribusi pangan masyarakat	15 desa Lumbung Pangan	81 Desa	93 Gapoktan	93 Gapoktan	100	94 Gapoktan	94 Gapoktan		KANTOR KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Desa Rawan Pangan	50% Desa Bebas Rawan Pangan	81 Desa	40 Desa	31 Desa	77.5	50 Desa	50 Desa	92	KANTOR KETAHANAN PANGAN
II	KEHUTANAN										
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Persentase kecukupan pangan	100 %	Meningkat	Meningkat	100 %	100	100 %	100 %	100	DINAS HUTBUN
		Desa ketahanan pangan	20 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	100	15 Desa	13 Desa	65	DINAS HUTBUN
		Jumlah Desa Rawan Pangan	50% Desa Bebas Rawan Pangan	81 Desa	40 Desa	31 Desa	77.5	50 Desa	50 Desa	92	DINAS HUTBUN
		Potensi Lahan	53.739 Ha	41.152 Ha	56919 Ha	56.919 Ha	100	55011 Ha	58.827 Ha	109.47	DINAS HUTBUN
2	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Pengamanan Kawasan Konservasi	Pengamanan secara optimal dgn target TNB, Hutan Lindung, Cagar Alam	Ada	Adanya Pengembangan, pengelolaan kawasan	1 Paket	100	Adanya Pengembangan, pengelolaan kawasan	Ada	100	DINAS HUTBUN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					sungai, danau & sumber daya air			sungai, danau & sumber daya air			
3	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	50 kali sosialisasi di Desa sekitar kawasan konservasi	Meningkat	Optimalisasi pengamanan kawasan konservasi	2 Musyawarah	100	Optimalisasi pengamanan kawasan konservasi	Meningkat		DINAS HUTBUN
4	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Pelestarian hutan dan lahan	Meningkatnya reboisasi hutan dan lahan		Meningkat	Meningkat	100	Ada Reboisasi	Meningkat		DINAS HUTBUN
5	Program rehabilitasi hutan dan lahan										
6	Program perencanaan dan pengembangan hutan										
7	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Masyarakat peduli lingkungan	Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi		Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	DINAS HUTBUN
8	Program rehabilitasi hutan dan lahan										
III	ENERGI DAN SUMBERDAYA										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MINERAL										
1	Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	Telah adanya energi terbarukan	460 Unit	1 Paket	1 Paket (60 KK)	100	Meningkat 10% dari tahun 2012	Meningkat		DINAS ESDM
		Peningkatan rasio elektrifikasi	85 %	54.84 %	61 %	61 %	100	70 %	70 %	82.35	DINAS ESDM
2	Program pengembangan dan rekayasa sumber daya mineral	Sumbangan pertambangan ke PAD (Galian C)	Rp. 1.100.131.000	Rp. 964.207.722	Meningkat	Rp. 1.179.132.891	100	Rp. 895.862.000	Rp. 14.6240.378.200	132.93	DINAS ESDM
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Kesejahteraan masyarakat sekitar tambang (Implementasi CSR)	Bantuan Listrik 900 RT, ternak 250 Ekor, Jalan & Jembatan	47 Sapi	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 43 Ekor, Jalan & Jembatan	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan, srta sarana pely publik	80	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan, srta sarana pely publik	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan, srta sarana pelayanan public		DINAS ESDM
		Peraturan tentang pengelolaan SDA	Peraturan tentang minerba, Perda ttg Air Bawah Tanah	Ada	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	DINAS ESDM
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	Frekuensi 24 kali	12 KALI	Meningkat	Meningkat	100	2 kali	Meningkat	50	DINAS ESDM
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Tingkat pencemaran lingkungan	Minimalisasi tingkat pencemaran	Menurun	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	100	DINAS ESDM

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			lingkungan								
IV	PARIWISATA										
1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjung Jabung Timur	Tersedia biro jasa perjalanan wisata di tanjab timur	Proses	1 Biro	1 Biro	100	1 Biro	1 Biro	100	DINAS BUDPARPORA
		Keterpaduan sistem jaringan moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	Adanya Sinergitas Sarana Moda Transportasi utk Pely. Kepariwisataan di Tanjab Timur	Diprogramkan	Diprogramkan	50 %	50	Diprogramkan	Diprogramkan	50	DINAS BUDPARPORA
2	Program pengelolaan keragaman budaya	Keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	Kawasan wisata bahari, wisata budaya dan wisata religi yg memenuhi standar	5 Paket	10 Paket	9 Paket	90	1 Paket	9 Paket	100	DINAS BUDPARPORA
3	Program pengelolaan kekayaan budaya	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	Tersedia sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional	Ada	Mulai adanya sist. Informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya & pengembangan budaya	Mulai adanya sist. Informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya & pengemb	100	Mulai adanya sist. Informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya & pengembangan budaya	Mulai adanya sist. Informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya & pengembangan budaya	100	DINAS BUDPARPORA
4	Program pengelolaan keragaman budaya										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					tradisional	gan budaya tradisional		tradisional	tradisional		
		Cakupan kajian seni 50%	100 %	Meningkat 10%	Meningkat 10% dari tahun 2011	Meningkat	100	Meningkat 10% dari tahun 2012	Meningkat	30	DINAS BUDPARPORA
5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisata 25%	100 %	Meningkat 5%	Meningkat 5% dari tahun 2011	Meningkat	100	Meningkat 5% dari tahun 2012	Meningkat	15	DINAS BUDPARPORA
6	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	DINAS BUDPARPORA
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase kualitas dan kuantitas fasilitas olah raga di setiap kecamatan secara merata 75%	100 %	15 %	30 %	40 %	133.33	45 %	35 %	35	DINAS BUDPARPORA
8	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Atlit Berprestasi terbina sejak usia dini	Ada Pembinaan	Ada Pembinaan	Anak usia Dini yang berprestasi	Ada Pembinaan	100	Pembinaan Atlit Berprestasi	Ada Pembinaan	100	DINAS BUDPARPORA
		Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlit berprestasi	Tersedia	Tersedia	Ada Anggaran atlit berprestasi	Tersedia	100	Ada Anggaran atlit berprestasi	Tersedia	100	DINAS BUDPARPORA
V	KELAUTAN DAN										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PERIKANAN										
1	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Lembaga ekonomi mikro	11 Unit	3 Unit	6 Unit	6 Unit	100	3 Unit	9 Unit	81.82	DINAS KELAPERI
2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Ikan Laut (ton)	40500 Ton	23118 Ton	29025 Ton	23.678 Ton	81.58	32400 Ton	31.280 Ton	77.23	DINAS KELAPERI
		Ikan Perairan Umum (ton)	1148 Ton	671 Ton	702 Ton	678.7 Ton	96.68	760 Ton	744.6 Ton	64.86	DINAS KELAPERI
3	Program pengembangan budidaya perikanan	Ikan Kolam (ton)	853 Ton	1307 Ton	260 Ton	321 Ton	123.46	300 Ton	2.272 Ton	266.35	DINAS KELAPERI
4	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan										
5	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Penurunan angka kemiskinan dari kantong kemiskinan di nelayan dengan bantuan pompon	2000 uNIT	Belum Dapat Diukur	10.5 %	10.5 %	100	750 Unit	960 Unit	48.00	DINAS KELAPERI
VI	INDUSTRI										
1	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pelayanan satu pintu	40 Jenis	31 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	100	29 Jenis	33 Jenis	82.50	DINAS PERINDAG
2	Program peningkatan	Nilai Ekspor (US\$)	Meningkat	2259 Juta	84.6 Juta	81.86 Juta	96.76	87.67 Juta	2.428,53 Juta	100	DINAS PERINDAG

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan pengembangan ekspor		Signifikan								
3	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi										
4	Program pengembangan industri kecil dan menengah										
5	Program peningkatan kemampuan teknologi industri										
6	Program penataan struktural industri										
7	Program pengembangan sentra-sentra industri potensi										
8	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Nilai Impor	Meningkat untuk Barang Modal	1179 Juta	262.7 Juta	16.24 Juta	6.18	17.35 Juta	1212.59 Juta	100	DINAS PERINDAG
		Pertumbuhan Ekonomi	7.11 %	5.91 %	6.18 %	7.44 %	120.39	6.37 %	8.51 %	119.69	DINAS PERINDAG
9	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Laju inflasi	5.53 %	10.52 %	70.8 %	4.22 %	1677.73	4.22 %	4.22 %	131.04	DINAS PERINDAG
10	Program peningkatan	PDRB atas harga	15,95 Juta	12,23 Juta	IDR	IDR	95.32	IDR	IDR	73236.03	DINAS PERINDAG

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2012	REALISASI RKPd TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kapasitas iptek sistem produksi	berlaku			11.578.952,1 9 Juta	11.036.813, 95 Juta		11.681.147,1 7 Juta	11.036.814 Juta		
11	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah Sentra industri kecil	18 Sentra	6 Unit	8 Unit	8 Unit	100.00	10 Unit	8.51 Unit	47.28	DINAS PERINDAG
12	Program penataan struktural industri										
13	Program pengembangan sentra-sentra industri potensi										
14	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah UKM	390 Unit	277 Unit	15.835 Unit	3.325 Unit	21.00	352 Unit	352 Unit	90.26	DINAS PERINDAG
15	Program penataan struktural industri										
16	Program pengembangan sentra-sentra industri potensi										
17	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah/UKM yang berperan	390 Unit	277 Unit	15.835 Unit	3.325 Unit	21.00	352 Unit	352 Unit	90.26	DINAS PERINDAG
18	Program penataan struktural industri										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2012)			TARGET PROGRAM/KEG IATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2013)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2012	REALISASI RKPD TAHUN 2012	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensi										
20	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	30 org/Unit	13 org/Unit	18 org/Unit	18 org/Unit	100.00	15 org/Unit	21 org/Unit	70	DINAS PERINDAG
21	Program peningkatan kemampuan teknologi industri										
22	Program pengembangan sentra-sentra industri potensi	Produk Unggulan	13 Jenis	2 Jenis	4 Produk	14 Produk	350.00	4 Produk	20 Produk	153.85	DINAS PERINDAG

2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan melihat fakta permasalahan dan tantangan pada tahun 2014, maka ditetapkan 12 poin isu strategis:

1. *Mengeliminir Bottlenecking* dan *unconnectivity* dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi dan sosial.
2. Pemenuhan kecukupan air minum dan energi.
3. Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi (Tahun 2011:11,60%).
4. Pencapaian pembangunan *Millenium Development Goals* (MDG's) 2015.
5. Ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability*).
6. Penataan zonasi dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan.
7. Penataan kelembagaan (*restrukturisasi perangkat daerah*), peningkatan layanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*)
8. Optimalisasi potensi pesisir, pantai dan lautan.
9. Pengembangan komoditi unggulan kepala dalam.
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
11. Pengembangan pariwisata.
12. Pengembangan kawasan Ujung Jabung.

Berikut disajikan sandingan isu strategis nasional 2014 dengan isu strategis daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 pada tabel berikut :

Tabel 2.24

Sandingan Isu Strategis antara RKP Tahun 2014
dengan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014

NO.	ISU STRATEGIS NASIONAL 2014		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2014
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2014	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas RB Nasional dan Perluasan RB Daerah 2. Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur 3. Penguatan Manajemen dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik 4. Pemantapan Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 	-	<p>Penataan kelembagaan (restrukturisasi perangkat daerah), peningkatan layanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance)</p>
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Akses PAUD yang Berkualitas 2. Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013 3. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU 4. Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan 5. Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sumber Daya Manusia. - Pencapaian pembangunan Millenium Development Goals (MDG's) 2015.

NO.	ISU STRATEGIS NASIONAL 2014		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2014
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2014	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata 3. Peningkatan Perbaikan Gizi 4. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 5. Penyiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 6. Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Peningkatan Keamanan, Mutu dan Manfaat/Khasiat Obat dan Makanan 7. Penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian pembangunan Millenium Development Goals (MDG's) 2015. - Pemenuhan kecukupan air minum
IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan Program Keluarga Harapan 2. Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) (lanjutan direktif Presiden) 3. Peningkatan produktivitas usaha mikro 4. Pelaksanaan BPJS Bidang Kesehatan (<i>demand side</i>) 	<p>Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 2. Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka pencapaian MDGs; 3. Pembangunan Shelter Bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi (Tahun 2011:11,60%). - Pencapaian pembangunan Millenium Development Goals (MDG's) 2015.

NO.	ISU STRATEGIS NASIONAL 2014		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2014
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2014	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula (lanjutan direktif Presiden) 2. Peningkatan produksi perikanan 3. Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability). - Optimalisasi potensi pesisir, pantai dan lautan
VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan (lanjutan direktif Presiden) 2. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industry (lanjutan direktif Presiden) 3. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah 4. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kawasan Ujung Jabung. - Mengeleminir bottlenecking dan unconnectivity dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi dan sosial.
VII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemudahan berusaha 2. Penurunan biaya logistik nasional 3. Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru 4. Memperkuat Kelembagaan Hubungan Industrial 	-	<p>Pengembangan komoditi unggulan kelapa dalam.</p>

NO.	ISU STRATEGIS NASIONAL 2014		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2014
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2014	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
VIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi 2. Peningkatan Rasio Elektrifikasi 3. Diversifikasi Pemanfaatan Energi (Konversi Energi/Gas) (lanjutan direktif Presiden) 	-	Pemenuhan Kebutuhan energi
IX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kawasan Hutan dan Pembangunan KPH 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, dan Pengembangan Perhutanan Sosial 3. Kapasitas Mitigasi Bencana (lanjutan direktif Presiden) 4. Pengendalian Kualitas Lingkungan 	-	Penataan zonasi dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan.
X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Daerah Tertinggal 2. Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security) kawasan perbatasan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Papua Dan Papua Barat (lanjutan direktif Presiden) 	-	Mengeleminir bottlenecking dan unconnectivity dalam pembangunan.
XI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Jatidiri Bangsa Dan Pelestarian Budaya 2. Peningkatan Kemampuan IPTEK dalam Rangka Mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Nasional (lanjutan direktif Presiden – teknologi unggulan) 	-	Pengembangan pariwisata.

NO.	ISU STRATEGIS NASIONAL 2014		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2014
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2014	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
XII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pembangunan <i>minimum essential force</i> didukung dengan pemberdayaan industri pertahanan (lanjutan direktif Presiden) 2. Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme (lanjutan direktif Presiden) 3. Penyelenggaraan pemilu 2014 4. Penegakan hukum dalam rangka membangun <i>integrated criminal justice system</i> (ICJS) 5. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan ham, serta peningkatan akses terhadap keadilan 	<p>Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Pemenuhan <i>Minimum Essential Force</i> tahap I; 2. Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri; 3. Penanganan Ancaman Gangguan Keamanan Dalam Negeri. 	-
XIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi Industrialisasi 2. Dengan Sasaran Pertumbuhan Industri Non-Migas Mendekati 8 Persen Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 3. Peningkatan daya saing koperasi dan UKM 	<p>Pemantapan Perekonomian Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); 2. Surplus Beras 10 Juta ton 2014; 3. Konversi Energi; 4. <i>Low Cost Emission Car (Green Car)</i>; 5. Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. 	Bottlenecking dan unconnectivity dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi dan sosial.

NO.	ISU STRATEGIS NASIONAL 2014		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2014
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2014	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
XIV	1. Peningkatan Kerukunan Beragama 2. Peningkatan Kualitas Layanan Haji 3. Peningkatan Pengelolaan Destinasi, Pemasaran, dan SDM Pariwisata 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan 5. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan 6. Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan 7. Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional	-	-

2.3.2 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Kondisi jalan dan jembatan yang sebagian besar buruk akan mempunyai akibat terhadap perkembangan ekonomi yang pada waktunya akan terjadi kemandekan. Hal ini ditandai tingginya biaya produksi atau logistik, pelayanan publik yang tidak maksimal dan investasi yang stagnan.
2. Angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan angka tertinggi di Provinsi Jambi (Tahun 2011 : 11,60%).
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mempunyai kendala dalam pencapaian MDG'S 2015 seperti air minum layak baru mencapai 12,94% pada tahun 2012 dari target MDG's 68,87% pada tahun 2015 dan sanitasi layak baru mencapai 33,60% pada tahun 2011 dari target MDG's 75,29% pada tahun 2015.

4. Ketahanan pangan dan kerentanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki aspek rawan dan rentan, seperti jumlah penduduk miskin 11,60% ; desa tanpa akses jalan 37,6%%; rumah tangga tanpa listrik 62% dan rumah tangga tanpa air bersih 87,06%.
5. Adanya trend berkurangnya luas lahan tanaman pangan sebesar 4% per tahun perlu menjadi perhatian khusus sehubungan dengan UU Nomor 41 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2011.
6. Optimalisasi potensi pesisir, pantai dan lautan perlu dilakukan mengingat sebagian besar penduduk kabupaten ini berprofesi sebagai nelayan, panjang garis pantai yang mencapai 191 Km dan potensi perikanan tangkap (laut) dengan luas areal tangkap seluas 77.752 Ha belum optimal dimanfaatkan.
7. Luas lahan kelapa dalam di kabupaten ini 59.370 Ha (49,94% luas lahan di Provinsi Jambi dan menyumbang 45,58% total produksi provinsi) tetapi produktivitasnya masih rendah 0,88 ton/Ha sedangkan provinsi mempunyai produktivitas 0,95 ton/Ha.
8. Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan potensi daerah masih kurang, seperti sektor agri industri dan maritim.
9. Banyak potensi wisata alam, kuliner dan religius masih belum maksimal dikembangkan.
10. Ujung Jabung yang mempunyai lokasi strategis tidak hanya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetapi Provinsi Jambi bahkan nasional, perlu bersama-sama dikembangkan menjadi kawasan strategis sesuai dengan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Kondisi ekonomi makro Indonesia tahun 2012 sebesar 6,23 persen sedikit turun dibandingkan tahun 2011 sebesar 6,5 persen. Sedangkan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi makro diperkirakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Penurunan Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 disebabkan sektor pertanian mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 23,06 persen disebabkan siklus musiman.

Pada tahun 2012 Pertumbuhan ekonomi pada sektor lainnya mengalami pertumbuhan khususnya bidang pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 9,98 persen diikuti oleh sektor Perdagangan, hotel, dan Restoran 8,11 persen, sektor Konstruksi 7,50 persen, sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 7,15 persen, sektor listrik, gas dan air bersih 6,40 persen, sektor industri pengolahan 5,73 persen, sektor jasa-jasa 5,24 persen, sektor Pertanian 3,97 dan sektor Pertambangan dan Penggalian 1,49 persen. Pertumbuhan PDB tanpa migas pada tahun 2012 mencapai 6,81 persen yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan PDB.

Pada tahun 2013, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 6,5% sampai dengan 6,9% didukung oleh permintaan domestik yang lebih baik dengan resiko eksternal dan tingginya harga energi. Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2013 masih terjaga dalam menghadapi tekanan berat ekonomi dunia berupa melambatnya perekonomian dunia, berlanjutnya krisis keuangan Eropa, gangguan cuaca dan iklim, serta ketegangan politik di Timur Tengah dan Iran.

Pada tahun 2012, rata-rata harian nilai tukar Rupiah mencapai Rp 9.300 per dolar AS atau melemah 5,9 persen dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya. Cadangan devisa mencapai USD 112,8 miliar bertambah sebesar USD 2,7% bandingkan tahun 2011. Laju inflasi pada tahun 2012 terkendali pada 4,3 persen atau dengan asumsi inflasi dalam APBNP 2012 sebesar 6,8% telah memasukan faktor kenaikan harga BBM bersubsidi, jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Penyajian indikator makro hasil pembangunan ini selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan serta perkiraan keadaan ekonomi di masa yang akan datang.

Kinerja proses pembangunan yang berlangsung saat ini secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang paling kerap digunakan dan dinilai merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah PDRB.

PDRB sebagai ukuran produktifitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Secara nominal Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyumbang sekitar 18 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jambi, atau nomor dua terbesar setelah Kota Jambi.

Sementara untuk pendapatan perkapita menunjukkan bahwa pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup baik, hal ini dapat dilihat dari angka PDRB perkapita yang selalu meningkat bahkan sudah mencapai Rp. 30,1 juta perkapita.

Dalam 5 tahun terakhir tercatat peningkatan angka PDRB lebih dua kali lipat, sehingga secara otomatis PDRB perkapita pun meningkat relatif tinggi. Pada tahun 2007, PDRB perkapita masyarakat Tanjung Jabung Timur hanya sebesar Rp. 22,4 juta, dan pada tahun 2011 ini telah mencapai angka Rp. 30,1 juta, atau naik sebesar 34,37 persen.

Secara umum ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh dari 5,78 % pada tahun 2010 menjadi 6,83% pada tahun 2011 atau pertumbuhan tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir, angka sementara pertumbuhan tahun 2012 mencapai 6,85%.

Berbeda dengan distribusi PDRB Provinsi Jambi, dominasi sektor masih berada pada sektor pertambangan sebesar 60 persen. Sektor yang diharapkan kedepan akan menjadi tulang punggung ekonomi adalah pertanian, namun hingga kini distribusinya sektor ini baru sebesar 18,15 persen.

PDRB ini merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai unit produksi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan *Release* BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 1403.1506, Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) sektor : (1) pertanian, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas, dan air bersih, (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel, dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa. Jumlah PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (*current price*) maupun berdasarkan harga konstan (*constant price*).

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan yang di dalamnya telah mencakup unsur tingkat inflasi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mengingat PDRB – harga berlaku mengandung unsur inflasi makro, maka tinggi rendahnya persentase PDRB tersebut lebih diakibatkan oleh tingginya tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB–harga berlaku belum dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Timur secara riil.

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil, dapat digunakan PDRB–harga konstan yang dapat merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Timur tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang

terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih.

Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran adalah PDRB perkapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi. PDRB perkapita dihitung dengan cara membagi jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka PDRB perkapita memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dan dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan persentase kenaikan atau penurunan PDRB–harga konstan suatu tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 meningkat dari tahun 2011 yaitu dari IDR **2,566,987.49** menjadi IDR **2,757,284.71**. Peningkatan ini merupakan indikasi dari membaiknya perekonomian kabupaten ini.

Tabel 3.1
PDRB (dalam jutaan) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Timur (%)
Tahun 2011 – 2012 (Harga Konstan)

No.	Sektor	2011*		2012**	
		PDRB	Laju Pertumbuhan	PDRB	Laju Pertumbuhan
1.	Pertanian	711.824,31	5,18	742.721,30	4,43
2.	Pertambangan dan penggalian	968.665,79	8,60	1.076.565,73	11,14
3.	Industri pengolahan	245.292,02	3,66	253.229,34	3,24
4.	Listrik, gas, dan air bersih	3.197,34	9,08	3.472,22	8,60
5.	Bangunan	34.672,97	6,35	36.933,39	6,52
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	383.849,34	8,82	417.230,31	8,70
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	97.016,33	5,01	100.609,22	3,70
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	33.669,52	7,50	35.245,20	4,68
9.	Jasa-jasa	88.799,87	3,68	91.277,90	2,79
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.566.987,49	6,83	2.757.284,71	7,41

* angka sementara

** angka sangat sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah

Struktur Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 terutama didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh sektor perdagangan-hotel dan restoran, industri pengolahan, jasa-jasa, pengangkutan – komunikasi, konstruksi – bangunan, keuangan – persewaan – jasa perusahaan, serta listrik – gas dan air bersih. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti pada tabel 1.4. berikut:

Tabel 3.2
Struktur Ekonomi Tanjung Jabung Timur (%) Atas Harga Berlaku
Tahun 2011-2012

No.	Sektor	2011	2012*
1.	Pertanian	17,20	16,44
2.	Pertambangan dan penggalian	60,32	61,62
3.	Industri pengolahan	7,55	7,22
4.	Listrik, gas, dan air bersih	0,10	0,10
5.	Bangunan	0,93	0,90
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	8,63	8,77
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	2,12	1,99
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	0,82	0,79
9.	Jasa-jasa	2,32	2,17

* angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah

Tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat disamping dari berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Perkembangan tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata per penduduk.

Bila diamati pola perubahannya, peningkatan pendapatan perkapita nominal ternyata lebih berfluktuasi mengikuti perubahan tingkat harga umum atau inflasi, tetapi laju kenaikan pendapatan perkapita rill meningkat secara konsisten. Peningkatan pendapatan perkapita rill menunjukkan dua hal yaitu: (1) peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang melebihi kenaikan tingkat harga umum dan (2) peningkatan pendapatan rill yang melebihi kenaikan jumlah penduduk. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang berswasembada pangan sehingga potensi gejolak kenaikan tingkat harga umum yang bersumber dari volatilitas harga komoditas pangan relatif kecil. Fakta menunjukkan tingkat harga komoditas bahan makanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat harganya di daerah lain khususnya dalam kawasan Provinsi Jambi.

Tabel 3.3
PDRB PerKapita Kab. Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 – 2012(Rupiah)

Tahun	Kab. Tanjung Jabung Timur	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2011	49.389.222	12.199.351
2012*	55.135.636	13.035.451
Pertumbuhan	11,63%	6,85%

** angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah

Peningkatan pendapatan perkapita rill menunjukkan bahwa telah terjadi upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2012 nilai pendapatan perkapita adalah sebesar Rp.13.035.451 per tahun atau Rp. 1.086.287 per bulan. Angka ini jauh diatas garis batas kemiskinan yaitu sebesar Rp.259.250. Bila hingga saat ini masih ditemui angka kemiskinan yang besar berarti lebih mencerminkan adanya ketimpangan pendapatan antar sektor ekonomi.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013

Ekonomi Global

Krisis ekonomi di belahan Eropa di penghujung tahun 2012 menjadi agenda yang kurang baik bagi perekonomian Indonesia dalam mengawali tahun pembangunan 2013. Kondisi perekonomian Negara-negara di eropa mendapat tekanan yang berat terutama dari sektor keuangan pemerintah yaitu berupa deficit anggaran yang relatif melebar dan beban hutang yang meningkat. Lebih lanjut penggunaan hutang yang tidak efisien dan tidak terarah semakin memberikan tekanan terhadap anggaran pemerintah. Tekanan fiskal tersebut berdampak melemahnya ketahanan ekonomidi beberapa Negara Eropa serta berkurangnya kesempatan kerja. Kondisi perekonomian di Negara Eropa

terutama Negara pada ring satu seperti Jerman, Irlandia, Yunani, Spanyol, Perancis, Italia dan Portugal dalam skema perkembangan ekonomi makro akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, yang pada gilirannya tentu saja akan mempengaruhi ekonomi di daerah.

Dampak krisis keuangan Eropa dan Amerika Serikat tersebut pada pasar keuangan dalam negeri berupa perubahan harga saham dimana pasar bereaksi terhadap berita dan kondisi eksternal dan internal. Kemudian nilai tukar juga mengalami kelemahan karena adanya aksi jangka pendek investormenarik portfolionya. Dampak lainnya adalah kenaikan yield surat utang pemerintah karena dipengaruhi oleh sentimen global akibat adanya ketidakpastian dipasar global serta kemungkinan adanya pengetatan kredit bila terjadi resesi ekonomi global.

Pada akhirnya, dampaknya terhadap ekonomi domestic akan terasa pada sector riil dimana volume dan nilai ekspor dapat mengalami penurunan, investasi menurun dan pendapatan masyarakat melemah. Krisis Global juga pada gilirannya akan mempengaruhi inflasi domestik dimana arah dan magnitudenya tergantung pada beberapa hal seperti perubahan harga komoditas, perubahan nilai tukar dan *imported inflation*. Adanya kemungkinan perlambatan perekonomian dan gejolak inflasi akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut membawa dampak pada sisi fiskal yaitu meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun untuk mendukung langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Bidang usaha utama yang mendukung tingginya penanaman modal asing sektor non migas adalah pertambangan (23,7 %); diikuti oleh transportasi, gudang, telekomunikasi (15,0%); industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik (9,9 %). Sementara itu, bidang usaha utama yang mendukung tingginya PMDN sektor nonmigas adalah tanaman pangan dan perkebunan (15,7%); industri non logam mineral (10,8 %); serta listrik, gas dan air (10,4 %)

sebagaimana terlihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Realisasi PMA dan PMDN Sektor Non Migas Triwulan III tahun 2011

PMDN			PMA		
Sektor/BidangUsaha	RpMilyar	%thd Total	Sektor/BidangUsaha	US\$Juta	%Thd Total
Tanaman Pangan dan Perkebunan	8.130,3	15,64	Pertambangan	3.400,7	23,71
Industri Non Logam Mineral	5.604,2	10,78	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2.150,4	14,99
Listrik Gas dan Air	5.420,7	10,43	IndustriLogam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	1.427,2	9,95
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	5.393,5	10,38	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	1.243,7	8,67
Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	5.292,4	10,18	Listrik Gas dan Air	1.161,6	8,10
LainLain	22.137,2	42,59		4.960,8	34,58
TOTAL	51.978,3			14.344,4	

Adapun barang ekspor yang akan mengalami dampak terbesar jika terjadi krisis di Eropa dan Amerika adalah produk kulit, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta perikanan. Faktor penyebabnya adalah karena sebagian besar ekspor TPT Indonesia ditujukan kepasar Amerika, sedangkan produk perikanan Indonesia merupakan supply yang cukup besar bagi pasar Eropa. Selain itu, ekspor Indonesia untuk kulit dan barang kulit (serta alas kaki) yang cukup besar ke pasar Eropa dan Amerika menyebabkan sektor ini terkena dampak yang cukup signifikan jika terjadi krisisEropa dan Amerika.

Di sisi lain, beberapa barang ekspor dari Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun terjadi krisis di Amerika dan Eropa adalah produk mineral, mesin dan kendaraan bermotor (termasuk komponennya), serta elektronik. Penyebabnya adalah (i) keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional (regional production network) untuk produk mesin, kendaraan bermotor, dan elektronik; serta (ii) melimpahnya sumber daya alam mineral di bumi Indonesia yang telah menyebabkan Indonesia sebagai salah satu pemasok utama produk mineral dipasar Global. Keuntungan komparasi (comparative advantage) ini juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat

menahan penurunan ekspor Indonesia di saat terjadinya krisis Amerika dan Eropa.

Untuk itu, upaya diversifikasi pasar ekspor menjadi hal penting yang perlu segera dilakukan, terutama untuk produk TPT, alas kaki, produk kulit, serta produk perikanan. Beberapa Negara yang berpotensi menjadi pasar tujuan pengalihan ekspor untuk produk TPT, alas kaki, dan produk kulit adalah Negara Afrika (Nigeria dan Afrika Selatan) dan negara-negara Timur Tengah. Adapun potensi pasar India yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempertahankan kinerja ekspor adalah produk pertanian, batubara, CPO, makanan/minuman, serta produk mineral. Sedangkan dipasar China, produk ekspor yang kinerjanya masih dapat dipertahankan adalah ekspor batubara, hasil hutan, serta produk mineral.

Ekonomi Nasional

Secara umum, dalam upaya menghadapi kemungkinan penyebaran krisis Eropa menjadi krisis Global, maka kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menjaga market confidence, memperkuat investasi, mendorong sektor eksternal, dan meningkatkan penajaman APBN.

Menjaga Market Confidence. Dalam menghadapi krisis yang terjadi, terutama pada tekanan nilai tukar yang terjadi, Bank Indonesia telah melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah. Hal ini tercermin dari menurunnya cadangan devisa dari 109,8 miliar US dollar pada akhir Agustus menjadi USD 112,8 milyar pada akhir bulan desember 2012. Sebagaimana respon atas meningkatnya aliran keluar modal portfolio, Bank Indonesia juga membeli obligasi negara secara langsung melalui lelang pasar sekunder sementara Kementerian Keuangan juga telah membeli kembali (buyback) SUN.

Pada bulan September Bank Indonesia menurunkan batas bawah dari koridor suku bunga untuk operasi moneter dari 100 menjadi 150 basis poin dibawah BI rate untuk menstimulasi transaksi pada pasar uang dalam negeri. Sebagai kelanjutan, pada bulan Oktober, Bank Indonesia telah menurunkan

sukubunga BI rate sebesar 25basis poin menjadi 6,50%. Keputusan tersebut didasari atas keyakinan bahwa inflasi pada akhir tahun ini maupun tahun depan akan berada dibawah 5%. Selain itu, penurunan Blrate ditempuh sebagai antisipasi untuk memitigasi dampak penurunan kinerja ekonomi dan keuangan Global terhadap kinerja perekonomian Indonesia.

Meningkatkan Investasi. Investor cenderung memilih Indonesia sebagai salah satu Negara tujuan investasi yang menarik dan aman dengan mempertimbangkan kekayaan sumber daya alam Indonesia, relative rendahnya upah buruh, besarnya pasar domestik, dan kecenderungan bertumbuh, serta stabilitas politik dan keamanan. Namun demikian berdasarkan laporan World Investment Report 2011 (UNCTAD 2011), perlu tetap dicermati bahwa masih terdapatnya permasalahan yang dapat mengurangi daya saing investasi yaitu masalah birokrasi, korupsi, dan kekurangan infrastruktur.

Kebijakan lainnya yang dirasakan akan mendorong peningkatan investasi adalah kebijakan tarif pajak. Pemerintah berencana untuk memberikan pembebasan pajak (tax holiday). Skema pembebasanpajak direncanakan berlaku sejak pertengahan bulan Agustus 2011 dengan masa pembebasan 5 hingga 10 tahun bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain: yang beroperasi di dalam satu dari lima sector industry dan berinvestasi dengan jumlah tidak kurang dari Rp. 1 triliun diIndonesia. Kelonggaran pajak lain yang diusulkan diperkirakan berupa penurunan pajak penghasilan badan sebesar 5% untuk 6 tahun bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, dilokasi tertentu, dan sektor usaha tertentu.

Investasi dapat menurun dengan adanya kebijakan yang tidak kondusif bagi investor. Dalam upaya meningkatkan daya saing investasi diIndonesia, beberapa tindak lanjut kebijakan investasi perlu lebih diupayakan, yakni:

- Menyederhanakan prosedur perizinan investasi dan apabila dimungkinkan perlu mengupayakan penyeragaman prosedur diseluruh Indonesia.
- Menyediakan infrastruktur yang memadai dan diikuti dengan peningkatan kualitas jasa pelayanan yang berstandar Internasional.

- Mengurangi ekonomi biaya tinggi (*minimizing transaction cost and rent seeking behavior*) disemua lini pemerintahan untuk mencapai transparansi dan *good governance* yang dipercaya.

Mendorong Sektor Eksternal. Dalam rangka antisipasi untuk meredam dampak krisis Global terhadap perekonomian Indonesia, perlu diupayakan penguatan strategi dibidang perdagangan. Beberapa strategi yang perlu difokuskan kedepan adalah:

- a. Meningkatkan diversifikasi pasar ekspor, sehingga tingkat kebergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang semakin menurun. Dengan demikian, rantai efek guncangan ekonomi di Eropa ataupun Amerika Serikat terhadap kinerja ekspor Indonesia kedepan diharapkan dapat lebih kecil.
- b. Meningkatkan daya saing produk Indonesia dipasar Global dan domestik. Daya saing produk Indonesia perlu ditingkatkan untuk menjaga permintaan terhadap produk Indonesia, baik di pasar Global maupun di pasar domestik. Memperkuat pasar dalam negeri baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Permintaan domestik perlu didorong untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Namun di lain pihak, perkuatan permintaan dalam negeri ini perlu diimbangi dengan meningkatnya kapasitas sisi penawaran domestik. Sehingga, kenaikan permintaan domestik dapat dipenuhi oleh barang-barang produksi domestik, dan bukan dipenuhi oleh barang-barang impor.
- c. Meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Upaya ini perlu dilakukan dengan cara mengurangi ekspor komoditas (barang mentah tanpa olahan) dan mendorong ekspor produk olahan; sehingga nilai tambah terhadap perekonomian Indonesia menjadi lebih tinggi.
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap impor illegal dan impor barang konsumsi. Salah satu target pasar dari reorientasi perdagangan Global adalah Indonesia, karena dianggap memiliki potensi pasar yang besar (jumlah penduduk banyak, perekonomian tumbuh cukup tinggi, serta daya

saing produk domestik rendah). Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengantisipasi terhadap potensi adanya serbuan barang-barang impor (baik secara legal maupun ilegal), dengan meningkatkan koordinasi dan proses pengawasan yang lebih baik.

Adapun komoditas yang dapat menopang pertumbuhan ekspor nonmigas kedepan adalah sebagai berikut:

1. Komoditas yang merupakan kebutuhan dasar manusia (basic needs) Kopi; Kakao; CPO (crude palm oil); Tekstil dan Produk Tekstil; Alaskaki/sepatu Ikan dan produk ikan.
2. Komoditas yang bukan “basic needs”, tetapi memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage), karena Indonesia memiliki sumber alam yang besar dan merupakan supplier utama dunia untuk komoditas tersebut seperti : Karet; Barang-barang tambang, seperti: bijih besi, timah, dan tembaga Batubara.
3. Produk manufaktur yang terkait dengan jaringan produksi regional (regional production network).

Ekonomi Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2011 mencapai 8,54% atau meningkat dibanding tahun 2010 yang hanya 7,35%. Pengeluaran rumah tangga masih menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2011 dengan porsi mencapai 59,89%, baru diikuti oleh ekspor, konsumsi nirlaba, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Domestik Bruto. Total PDRB Provinsi Jambi Tahun 2011 mencapai Rp. 63,27 triliun, yang didominasi sektor pertanian (29,35%) diikuti dengan sektor pertambangan dan penggalian (19,07%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (14,98%) serta 6 (enam) sektor lainnya mempunyai kontribusi sebesar 36,6%.

Adapun impor kota Jambi tahun 2011 sebesar 2,76% atau menurun bila dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 5,31%. Inflasi tahunan Kota Jambi ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,79%. Berdasarkan kotanya,

tingkat inflasi di Jambi merupakan urutan ke-9 (sembilan) terendah dari 66 (enam puluh enam) kota di Indonesia dan merupakan inflasi terendah di Pulau Sumatera. Inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2011, secara umum disumbangkan oleh inflasi kelompok makanan. Faktor-faktor yang berpotensi memberikan tekanan inflasi pada tahun mendatang antara lain adalah : (1) Meningkatnya pembangunan residensial yang dapat memicu kenaikan barang-barang material dan jasa tukang; (2) Kondisi infrastruktur (jalan dan jembatan) yang dapat berakibat pada meningkatnya biaya distribusi dan transportasi; (3) Kondisi cuaca dapat berakibat pada produksi hasil pertanian dan biaya distribusi; (4) Kenaikan dan kelangkaan minyak (BBM).

Nilai Tukar Patani (NTP) sepanjang tahun 2011 berkisar antara 95,19 – 96,04. Dari sini asal UMP Provinsi Jambi pada tahun 2012 meningkat 11,14% yaitu dari Rp.1.028.000,- menjadi Rp. 1.142.500,- dan merupakan UMP Kelima tertinggi di Sumatera setelah NAD, Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Untuk menentukan arah kebijakan keuangan daerah harus dilihat dari beberapa indikasi pendukung yaitu proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Proyeksi dibuat dengan beberapa asumsi yang mendukung terhadap rencana atau target pencapaian. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar arah kebijakan keuangan daerah memiliki perencanaan yang jelas dan terukur. Arah kebijakan keuangan daerah ini sangat mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui

berbagai upaya, baik upaya peningkatan pajak daerah maupun meningkatkan perolehan dana perimbangan.

Sebelum menjelaskan rencana Pendapatan Daerah tahun 2013, terlebih dahulu perlu dilihat realisasi Pendapatan Daerah tahun 2011, yang dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 s.d Tahun 2013

NO	Uraian	Jumlah Pagu		
		Tahun 2012	Tahun Berjalan 2013	Proyeksi Pada Tahun 2014
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	23,951,374,930.00	27,485,500,000 .00	28,935,200,000.00
1	Pajak Daerah	2,280,125,000.00	5,350,500,000.00	7,612,000,000.00
2	Retribusi	2,339,250,000.00	4,452,400,000.00	4,812,500,000.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6,106,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
4	Lain-lain PAD yang sah	13,225,999,930.00	12,682,600,000.00	11,510,100,000.00
II	DANA PERIMBANGAN	651,189,908,152.00	774,035,602,352.00	779,888,257,918.00
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak	276,397,205,152.00	335,583,050,352.00	349,505,145,918.00
2	Dana Alokasi Umum	356,323,443,000.00	430,383,112,000.00	430,383,112,000.00
3	Dana Alokasi Khusus	18,469,260,000.00	8,069,440,000.00	-
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61,666,574,679.00	28,827,699,224.85	32,041,435,375.94
1	Pendapatan Hibah	-	-	-
2	Dana Darurat	-	-	-
3	DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	19,191,363,347.00	19,191,363,347.00	22,405,099,498.09
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	34,372,878,000.00	-	-
5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pmdalainnya	8,102,333,332.00	9,636,335,877.85	9,636,335,877.85
	JUMLAH	736,807,857,761.00	830,348,801,576.85	840,864,893,293.94

Dari tahun ke tahun, pendapatan cenderung mengalami peningkatan, meskipun komponen-komponennya berfluktuatif. PAD menjadi sumber utama pendapatan, dimana komponen terbesarnya diperoleh dari Lain-Lain PAD Yang Sah.

Pendapatan Daerah pada tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. **840.864.893,94**. Pendapatan tahun 2014 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar

Rp. **28.935.600.000**, Dana Perimbangan sebesar Rp.**787,888.257.918,00** dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp.**32.041.435.375,94**.

Sumber PAD terbesar diperoleh dari Lain-Lain PAD Yang Syah yaitu Rp. **11.510.100.000**. Sedangkan komponen lainnya yang juga diperkirakan meningkat dibandingkan dengan angka penetapan tahun 2013 yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebesar Rp. 5,000,000,000, serta Pajak Daerah yang sah Rp. 7,612,600,000. Sedangkan retribusi daerah diproyeksi meningkat dibandingkan dengan angka penetapan Tahun 2013, yaitu sebesar Rp 4,812,500,000.

Sumber terbesar komponen dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum yang diperkirakan pada tahun 2014 mencapai Rp 430,383,112,000, dan Dana Bagi hasil pajak/Non Pajak tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp 349.505.145.918. Sedangkan Dana Alokasi Khusus belum dapat diperkirakan.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah melalui beberapa hal sebagai berikut :

- Membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan swasta. Kesadaran ini dimaksudkan untuk menciptakan kesiapan dan kemampuan membayar berbagai retribusi.
- Menetapkan landasan sumber penerimaan yang membangun potensi ekonomi masyarakat.
- Mengoptimalkan peran berbagai perusahaan di daerah guna dapat membiayai sebagian kebutuhan biaya pembangunan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan peralatan dan sarana milik daerah serta mencegah terjadinya kebocoran.

- Menggali berbagai sumber penerimaan melalui Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan lebih atas serta tidak menjadi faktor negatif untuk investasi di daerah.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan dan arah keuangan daerah pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu penerimaan dan pengeluaran. Akan tetapi lebih dari itu kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan dasar dari otonomi daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur-unsur keadilan, dan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Prinsip utama penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bagaimana meningkatkan keefektifannya dalam pencapaian sasaran pembangunan. Keefektifan ini secara ekonomi ditentukan oleh besaran ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Untuk perekonomian tingkat Nasional dilaporkan besaran ini Tahun 2009 adalah 4, dengan adanya perbaikan pada perekonomian makro maka besaran ini diyakini akan mendekati 3,2 selama tiga tahun ke depan. Bila hal ini berlaku untuk perekonomian daerah, maka konsekuensinya pengeluaran yang sama akan dapat meningkatkan output yang lebih besar.

Akan tetapi harapan seperti diatas harus dilaksanakan dengan penciptaan kondisi dimana seluruh bentuk pengeluaran harus didasarkan kepada prinsip **akuntabilitas** dan **transparansi**, dan **memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat** serta terkait dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016. Dengan demikian maka setiap pengeluaran harus mencapai sasaran pembangunan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk tahun 2014, kebijakan di bidang pengeluaran telah ditetapkan sebagai Kebijakan Strategis Bupati Tanjung Jabung Timur terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 diantaranya:

1. Membatasi belanja pegawai pada alokasi belanja langsung maksimal 5 % dari total APBD;

2. Membatasi Belanja Program Kegiatan Pro Aparatur Tidak Lebih Besar Dari Yang Dialokasikan Dalam APBD 2013;
3. Mengalokasi belanja modal sampai 40 % dari total RAPBD;
4. meningkatkan secara signifikan alokasi dana untuk UPT kecamatan lingkup Dinas Pendidikan, BP4K dan UPT lainnya sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, melalui redistribusi anggaran SKPD yang bersangkutan;
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan layanan, penyederhanaan prosedur dan tatalaksana serta upaya-upaya lain;
6. Menampilkan praktek terbaik (best practices) pelayanan publik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi, penerapan pelayanan berstandar internasional (ISO) serta menerapkan sistem jemput bola (drive thru);
7. Meningkatkan jejaring dan konektivitas antara SKPD Kabupaten dengan SKPD tingkat Provinsi dan Kementerian guna memperoleh peningkatan alokasi kegiatan dan dana tugas perbantuan, DAK atau yang sejenisnya;
8. Memprogramkan rehabilitasi sekolah dan rumah dinasnya, sarana pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lain dengan skala prioritas mulai dari desa sangat-sangat terpencil, sangat terpencil, terpencil, serta biasa;
9. Meningkatkan Alokasi Dana Desa untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur khusus masyarakat setempat seperti : pasar desa, tambatan perahu, TPA, posyandu, lapangan olahraga di desa atau Poskamling yang sekaligus difungsikan sebagai pos siaga bencana;
10. Mengembangkan kawasan destinasi, sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki, sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan;
11. Memperkuat sinergisitas antar sektor dan bidang pembangunan guna memperoleh hasil yang maksimal;
12. Pelaksanaan Bedah Rumah dan sertifikasi SAMUDRA serta SAMISAKE yang dilaksanakan oleh kecamatan, agar terus ditingkatkan kualitasnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran, serta terbuka untuk diawasi masyarakat;

13. Program lingkup SKPD pertanian fokus pada upaya pengembangan dan pengelolaan lahan pangan pertanian berkelanjutan, Dinas PU terlibat sepenuhnya dalam penyiapan pengairan dan irigasi serta prasarana ke desa lokasi LP2B;
14. Mempercepat Pelaksanaan pengadaan pompong dan alat tangkap bagi nelayan sesuai dengan ketentuan, tatalaksana pendistribusian bantuan pompong agar terus disempurnakan sehingga tepat sasaran;
15. Camat dan SKPD terkait agar memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui pinjaman kredit modal kerja kelurahan/desa, sumber dana APBD Kabupaten yang dititipkan pengelolaannya kepada Bank Jambi Cabang Muara Sabak;
16. Melaksanakan lomba kebersihan antar kecamatan dan kelurahan serta antar desa, melalui kompetisi yang jujur dan sehat, sebagai bagian dari upaya mencapai kehidupan serta kabupaten sehat dan bersih.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah; penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, PAD, dana perimbangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Selama ini kebijakan penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan pendapatan asli pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan, sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya dan sisa kegiatan lanjutan.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah bentuk pengeluaran pembangunan yang penggunaannya meliputi pelaksanaan kegiatan program, penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (di Bank Jambi).

Pengeluaran pembiayaan disesuaikan dengan penerimaan pembiayaan, namun kebijakan anggaran defisit dapat diterapkan sejauh kegiatan program tersebut bertujuan mempercepat tercapainya visi kabupaten. Besaran anggaran defisit disesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk mengoptimalkan pembiayaan, harus dihindari atau ditekan serendah mungkin terjadinya dana yang menganggur (*idle money*) yang merupakan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan.

Besaran pengeluaran setiap SKPD **disesuaikan** dan **merefleksikan beban** dan **tanggung jawab** SKPD yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan SKPD yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.

BAB 4

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/ tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan Kepala Daerah yang berhubungan dengan janji politik Kepala Daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, karena terkait dengan keterbatasan anggaran, identifikasi dan *magnitude* masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan Kepala Daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap berbagai isu-isustrategis daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011 - 2016 Tahun ke 4. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, adalah:

**“MENUJU TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA, ADIL, MANDIRI, UNGGUL,
DEMOKRATIS DAN AGAMIS (SAMUDRA)”**

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut:

1. Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan SDM yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas);
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan SDM profesional;
4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas);
6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat;
7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional;
8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi.

Kesembilan fokus tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang konsisten menuju terwujudnya Visi Misi Pembangunan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan publik, yang menjadi fokus peningkatannya adalah pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan dan perizinan. Pelayanan pendidikan merupakan kunci peningkatan sumber daya manusia dan bersifat jangka panjang dan sebagai modal pembangunan yang utama. Kualitas pendidikan yang baik juga dapat memberi peluang untuk berkompetisi dalam penyediaan tenaga kerja. Disamping itu, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga menjadi prioritas utama dalam membentuk manusia yang handal dalam menjalankan roda pembangunan. Untuk mewujudkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas tidak hanya menjadi beban pemerintah semata, keterlibatan dari unsur swasta dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan

pencapaian tersebut. Peningkatan kualitas layanan publik difokuskan diantaranya pada pelayanan identitas kependudukan dan perizinan.

Pertumbuhan Ekonomi yang diarahkan pada tahun ke-4 pada tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih difokuskan pada pengembangan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sekaligus sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Potensi akan sumber daya tersebut memang sangat mungkin dikembangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan topografi dan luasan lahan yang tersedia menjadikan sektor pertanian bisa menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan dalam merintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan tersebut.

Kebijakan khusus yang ditempuh juga untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah strategis dan cepat tumbuh perlu mempertimbangkan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pada tahun ke-4 pembangunan jangka menengah tetap melanjutkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan sumberdaya alam lestari, yang diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun (2011-2016) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian masyarakat hingga wilayah terpencil	1. Penuntasan perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi
			2. Terwujudnya perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.
			3. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)
			4. Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat
			5. Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik
			6. Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.
			7. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas)	Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	1. Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)
			2. Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sdm profesional.	Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.	1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
			2. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-budget dan e-audit
			3. Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan
			4. Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.
			5. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan
			6. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).
			7. Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN
4	Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya	Mewujudkan roda perekonomian masyarakat dan struktur ekonomi yang kokoh yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.
			2. Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.
			3. Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah
			4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			<p>kebutuhan dasar masyarakat.</p> <p>5. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.</p> <p>6. Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi</p> <p>7. Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga</p> <p>8. pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal</p> <p>9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah</p>
5	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sehat, produktif dan berdaya saing	<p>1. Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau.</p> <p>2. Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap</p> <p>3. Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.</p> <p>4. Pelayanan dan Perlingungan kesehatan keluarga, ibu dan anak</p>

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
6	Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat	Menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dengan prinsip saling menguntungkan antar pihak yang bersengketa dilandasi semangat kekeluargaan dan persaudaraan	1. Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.
			2. Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.
7	Meningkatkan penataan zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.	Mewujudkan penataan zona dan melestarikan kawasan perlindungan situs budaya tradisional sebagai pusat penelitian budaya, wisata budaya dan warisan budaya	1. Kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.
			2. Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.
			3. Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.
8	Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi	Terciptanya keselarasan, kedamaian, ketentraman dan jalinan persaudaraan antar umat beragama, antar suku, antar golongan masyarakat	1. Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.
			2. Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah
			3. Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku
			4. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial
			5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			6. Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
9.	Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga di setiap kecamatan dan pembinaan atlet untuk berprestasi	Tersedianya sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi sebagai media menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan	1. Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan. 2. Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan 3. Penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah. 4. Pengembangan dan pendidikan pemuda/I Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, sebagaimana tabel di atas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Penuntasan perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Provinsi;
2. Terwujudnya perluasan jangkauan jaringan aliran lisrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa;
3. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu);
4. Penyelesaian pembangunan tanggul dan irigasi terutama di kawasan pertanian masyarakat;
5. Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik;
6. Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi;

7. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu;
8. Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik);
9. Tenaga Kerja yang terampil dan siap kerja;
10. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
11. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-budget dan e-audit;
12. Penataan wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
13. Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas dari KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur;
14. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan;
15. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji);
16. Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas dari KKN;
17. Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi;
18. Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan;
19. Operasionalisasi BUMD yang dapat memberikan sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah;
20. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat;
21. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran;
22. Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi;

23. Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga;
24. pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal;
25. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;
26. Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau;
27. Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap;
28. Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya;
29. Pelayanan dan Perlingungan kesehatan keluarga, ibu dan anak;
30. Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan;
31. Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi;
32. Kesadaran para stokeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan;
33. Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup;
34. Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup;
35. Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam;
36. Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah;
37. Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku;

38. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial;
39. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis;
40. Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
41. Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan;
42. Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan;
43. Penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah;
44. Pengembangan dan pendidikan pemuda/pemudi Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional.

4.2 PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014

Dari prioritas dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016. Maka untuk prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan
2. Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's)
3. Infrastruktur
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup
9. Hukum, sosial, budaya dan Seni olah raga

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD) 2014
I.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (Pendidikan gratis berkualitas) 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi, akuntabel dengan penempatan sumber daya manusia yang profesional. 4. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas). 6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat. 7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional. 8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokratis. 9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan alit berprestasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Pemerintahan 2. Pencapaian MDG'S 3. Infrastruktur 4. Pendidikan 5. Kesehatan 6. Ekonomi Kerakayatan 7. Penanggulangan Kemiskinan 8. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup 9. Hukum, sosial, budaya dan Seni olah raga

1. Tata Kelola Pemerintahan

- 1) Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintah pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel melalui penetapan SOP, Standar Pelayanan Minimal (SPM), ISO dan Evaluasi Kinerja Kepala Daerah, dan Renja SKPD berbasis kinerja yang terukur secara kuantitatif;

- 3) Penyempurnaan implementasi manajemen kepegawaian berbasis *System Merried* dalam rangka peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai;
- 4) Memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan dan unit pengelola teknis di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa;
- 5) Perlakuan khusus untuk PNS yang dinas didaerah *remote area*.

2. Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's)

- 1) Pemberdayaan masyarakat desa melalui penambahan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 2) Pemberian Bantuan Permodalan terutama untuk masyarakat kurang mampu.
- 3) Pemenuhan sarana sanitasi dan air minum.
- 4) Pelaksanaan Bedah Rumah dan Sertifikasi SAMUDRA yang sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran.

3. Infrastruktur

- 1) Pembangunan jalan poros ekonomi seperti ruas jalan zone V dan ruas jalan Sabak Timur – Nipah Panjang dengan kekuatan jalan; MST > 8 ton;
- 2) Pembangunan tanggul dan jaringan irigrasi;
- 3) Memperluas dan meningkatkan jalan produksi desa dan jembatan;
- 4) Pemenuhan sarana fasilitas keselamatan jalan;
- 5) Pemenuhan air minum dan sarana sanitasi penduduk;
- 6) Perluasan jaringan listrik inter koneksi ke semua kecamatan dan 70 % desa;
- 7) Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik seperti untuk daerah *remote area* dengan PLTS.

4. Pendidikan

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah maupun tinggi melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dua belas tahun yang merata;

- 3) Regulasi peraturan wajib belajar 12 tahun melalui penyusunan PERDA;
- 4) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan siswa SMA dan SMK/ sederajat melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan (laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga dan praktikum);
- 5) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal;
- 6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini;
- 7) Pembangunan SMK Jurusan Pertambangan.
- 8) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
- 9) Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan;
- 10) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
- 11) Pemenuhan kebutuhan guru di daerah sangat terpencil di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan berbak;
- 12) Perlakuan khusus untuk sekolah di remote area (khususnya di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan Berbak);
- 13) Pemantapan tatakelola BOS sehingga efisien dan efektif;
- 14) Pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas guru;
- 15) Meningkatkan akses pelatihan dan keterampilan kerja melalui pembinaan dan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 16) Meningkatkan APM SD/ sederajat menjadi sebesar 95,89 %;
- 17) Meningkatkan APM SMP/ sederajat menjadi sebesar 80,10 %;
- 18) Meningkatkan APM SMA/ sederajat menjadi sebesar 64,20 %;
- 19) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan paket A, B dan C;
- 20) Memantapkan pengelolaan dan proses belajar Pendidikan Tinggi kerjasama Universitas Jambi dengan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur.

5. Kesehatan

- 1) Meningkatkan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu, ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) menjadi sebesar 85 persen;
 - b. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) menjadi sebesar 90 persen;
 - c. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi sebesar 85 persen dan imunisasi campak menjadi sebesar 90 persen;
 - d. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi sebesar 90 persen;
 - e. Menurunnya persentase balita gizi buruk secara bermakna, dan semua balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar;
 - f. Terlaksananya penempatan tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah;
 - g. Meningkatnya persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) menjadi sebesar 70 persen;
 - h. meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 70 persen;
 - i. meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- 2) Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesar 85 persen;

- 3) Semua penduduk miskin memiliki kartu Jaminan Kesehatan;
- 4) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan :
 - a. meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan menjadi sebesar 75% dan yang disembuhkan menjadi sebesar 86%; dan
 - b. meningkatnya angka penemuan kasus malaria menjadi sebesar 1,75 per 1.000 penduduk.
- 5) Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB;
- 6) Meningkatnya sarana kesehatan yang merata melalui penyediaan dan peningkatan kualitas layanan di Puskesmas dan satelitnya serta RSUD yang terakreditasi;

6. Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan

- 1) Mempercepat Pengembangan kawasan agropolitan, dengan membentuk satgas pengembangan;
- 2) Penguatan modal, saprodi dan komposter;
- 3) Penguatan dan optimalisasi lembaga penyuluhan Daerah dan BP3K di kecamatan/Desa, melalui peraturan tatalaksana dan tenaga penyuluh; pemenuhan peralatan kerja, serta menjadikan BP3K sebagai Demplot dan sekolah lapangan bagi siswa dan petani;
- 4) Optimalisasi BBI Dendang dan TPI Nipah Panjang, PPI Teluk Majelis, Pabrik Es, tambak dan keramba rakyat;
- 5) Pelaksanaan perluasan lahan pertanian, dan perikanan sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan dan Tata Ruang;
- 6) Meningkatkan produksi pertanian dan produktifitas petani;
- 7) Ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik melalui perbaikan mekanisme distribusi pupuk;

- 8) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan khususnya jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan produksi di daerah sentra produksi;
- 9) Bantuan modal kerja Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000,- per desa;
- 10) Penyiapan sarana untuk mendidik tenaga profesional melalui lanjutan pembangunan BLK, peralatan dan instruktur, serta pelatihan keterampilan yang berkualitas;
- 11) Pemberdayaan UMKM melalui kemudahan memperoleh modal usaha, bimbingan dan peralatan;
- 12) Optimalisasi fungsi koperasi (KUD) pembentukan lembaga ekonomi mikro (Bumdes), serta kemudahan memperoleh modal usaha;
- 13) Memberikan kemudahan berusaha dan investasi melalui peningkatan pelayanan terpadu;
- 14) Pengembangan ekonomi pedesaan melalui pengembangan pasar kecamatan, dan bantuan modal kerja;
- 15) Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan;
- 16) Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan perikanan dan kelautan;
- 17) Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing;
- 18) Pengembangan usaha agroindustri;
- 19) Pengembangan kelembagaan keuangan mikro;
- 20) Meningkatnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan tahun 2014 sebesar 92,75 %;
- 21) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2014 lebih dari 6,57.

- 22) Mengembangkan kawasan destinasi, sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

7. Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Penanggulangan kemiskinan melalui bantuan pembentukan modal bentuk natura untuk peningkatan pendapatan (bibit sapi, tanaman, palawija, saprodi, kapal dan alat tangkap, dan sebagainya) bagi keluarga miskin dan hampir miskin.
- 2) Menggerakkan perekonomian pedesaan, dengan meningkatkan ADD secara bertahap hingga mencapai 10% dari dana perimbangan, sekaligus memberdayakan masyarakat desa. Berbagai kegiatan pembangunan yang dikerjakan dengan teknologi sederhana, padat karya serta dengan nilai dibawah Rp. 200 juta harus dilaksanakan dengan pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan dibiayai melalui ADD.
- 3) Mengurangi beban keluarga miskin dan hampir miskin untuk memperoleh pelayanan publik (seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan) dan bantuan perbaikan lingkungan dan perumahan yang layak, santunan kematian.
- 4) Mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan keluarga miskin dan keluarga dengan kondisi khusus.
- 5) Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan
- 6) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

8. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup

- 1) Penyiapan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Wilayah
- 2) Mengurangi lahan dan DAS kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan, normalisasi saluran/sungai, pembangunan tanggul serta peningkatan

pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan.
- 4) Tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH.

9. Hukum, Sosial, Budaya dan Seni Olahraga

- 1) Meningkatkan kualitas legislasi melalui program legislasi daerah (penyusunan rencana PERDA) di pendidikan dan Perda-Perda lain;
- 2) Meningkatkan penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi melalui penyuluhan/sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan PERDA terkait HAM dan pemberantasan korupsi;
- 3) Pembinaan dan penggalian seni budaya daerah melalui pembangunan secara bertahap sanggar seni dan budaya di Kecamatan;
- 4) Apresiasi seni budaya agar kelestariannya tetap terjaga;
- 5) Pengelolaan cagar budaya dengan baik;
- 6) Mengenalkan seni budaya dan pariwisata melalui web-site (www.tanjabtinkab.go.id);
- 7) Pembinaan cabang olah raga sejak dini dan cabang olah prestasi;
- 8) Pembangunan Sport Centre di tingkat Kabupaten secara bertahap
- 9) Menjalin kerjasama dengan Kota/Kabupaten dalam Provinsi dan luar Provinsi untuk menarik minat masyarakat, diantaranya melalui paket bersama dan pengembangan "Sister City";
- 10) Meningkatnya kapasitas dan kreativitas pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan taqwa, seni budaya dan industri kreatif;
- 11) Terselenggaranya paket riset-riset dasar, terapan dan paket riset insentif.

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini pada dasarnya merupakan *akumulasi, sintesisasi* dan *resultante* dari Rencana Kerja (Renja) seluruh SKPD di Tanjung Jabung Timur, baik yang bersumber dari pembiayaan Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten bersumber dari pembiayaan APBD Provinsi dan Pemerintah (APBN). Proses penyusunan dan penerapan mata anggaran ini senantiasa mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:

1. Program Prioritas I :

Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2014 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan Kepala Daerah.

2. Program Prioritas II :

Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangkapencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 serta indikatornya.

3. Program Prioritas III :

Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan

target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab.

Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD.

Rencana kerja dan pendanaan merupakan substansi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Daftar yang disajikan meliputi Rencana Kerja Tahun 2014 yang memuat uraian program dan kegiatan, target output dan outcome yang harus diwujudkan berikut jumlah dana yang dibutuhkan dan lokasi pelaksanaan kegiatan.

Daftar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 disusun berdasarkan kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi, yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan (sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) , sebagaimana yang disajikan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

BAB 6

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 merupakan tahun ke-4 (empat) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari otonomi daerah dan pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) melalui Forum SKPD dan FGD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jambi dan ke Pemerintah melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selain dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga ditentukan pula dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada.

Dokumen RKPД Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2014 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPД Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014, tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program RKPД Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 dengan sebaik - baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014, RKPД ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, APBD

Provinsi Jambi maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2014 sebagai penjabaran dari Rencana Starategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD)

5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program - program pembangunan. Program tersebut direncana berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2014, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Kebijakan Umum APBD 2014 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD 2014.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, MA